



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA



Laporan Kunjungan Studi

DESAIN DAN IMPLEMENTASI KEAMANAN HAKIM DAN PENGADILAN DI AMERIKA SERIKAT

Washington, D.C. dan New York Amerika Serikat
10-19 Juni 2023



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Laporan Kunjungan Studi

DESAIN DAN IMPLEMENTASI KEAMANAN HAKIM DAN PENGADILAN DI AMERIKA SERIKAT

**Washington, D.C. dan New York Amerika Serikat
10-19 Juni 2023**

DESAIN DAN IMPLEMENTASI KEAMANAN HAKIM DAN PENGADILAN DI AMERIKA SERIKAT

**Washington, D.C. dan New York Amerika Serikat
10-19 Juni 2023**

Diterbitkan oleh:
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun
tanpa ijin tertulis dari penerbit.

Tim Pengusun

Penanggung Jawab:

Binziad Kadafi, S.H., L.L.M., Ph.D.

Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.

Dr. Arie Sudihar, S.H., M.Hum.

Redaktur:

Untung Maha Gunadi, S.H., M.Si.

Penulis:

Binziad Kadafi, S.H., L.L.M., Ph.D

Lina Maryani, S.H., M.H.

Kurniawan Desiarto, S.H., M.H

Tabah Sulisty, S.H., M.H.

Miko Susanto Ginting, S.H., M.A.

Kontributor:

Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.

Dr. Arie Sudihar, S.H., M.Hum.

Ir. Supriatna, MMSI.

Editor:

Binziad Kadafi, S.H., L.L.M., Ph.D

Lina Maryani, S.H., M.H.

Kurniawan Desiarto, S.H., M.H

Tabah Sulisty, S.H., M.H.

Desain Grafis & Sampul:

Heri Sanjaya Putra



LEMBAR PENYANGKALAN:

Semua informasi yang tertera di dalam laporan ini terbuka untuk dikutip dan dipergunakan sesuai dengan keutuhan konteks dan substansinya. Pengutipan dapat mengikuti kaedah:

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Laporan Kunjungan Studi: Desain dan Implementasi Keamanan Hakim dan Pengadilan di Amerika Serikat*, Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2023.

Daftar Isi

Tim Penyusun.....	v
Lembar penyangkalan	vi
Daftar Isi.....	vii
Kata Pengantar	ix
Bab I Latar Belakang dan Relevansi Kunjungan Studi	1
Latar belakang.....	1
Maksud dan tujuan.....	5
Dasar pemilihan lokasi.....	6
Kerjasama dengan <i>Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPDAT)</i>	6
Delegasi.....	7
Waktu dan tempat	8
Narasumber dan pihak yang dikunjungi.....	8
Batasan dan ruang lingkup laporan.....	10
BAB II Lembaga Keamanan Hakim dan Pengadilan di Amerika Serikat	15
Sejarah dan perkembangan <i>the US Marshals Service (USMS)</i>	15
Struktur organisasi <i>the US Marshals Service (USMS)</i>	17
Tugas dan tanggung jawab <i>the US Marshals Service (USMS)</i>	21
BAB III Observasi Praktik Keamanan Hakim dan Persidangan di Amerika Serikat	31
Visi	32
Misi	33
Washington D.C. <i>Superior Court</i>	34
<i>Supreme Court, 1st Street NE, Washinton DC</i>	39
<i>Federal Court in Eastern District of New York</i>	40
<i>US District Court for the Southern District of New York</i>	46

BAB IV Pelajaran Kunci dari Desain dan Implementasi Keamanan Hakim dan Pengadilan di Amerika Serikat60

Konteks keamanan hakim dan persidangan di Amerika Serikat 51

Kelembagaan keamanan hakim dan pengadilan di Amerika Serikat 54

Koordinasi keamanan hakim dan pengadilan..... 58

Sarana dan prasarana keamanan hakim dan pengadilan 62

Anggaran keamanan hakim dan pengadilan 66

Sumber daya manusia keamanan hakim dan pengadilan..... 67

Desain protokol keamanan hakim dan pengadilan 69

Transparansi, partisipasi, dan kepercayaan publik serta kualitas proses dan hasil hakim dan pengadilan 72

BAB V Simpulan 79

Lampiran 81

Surat undangan dari *Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPDAT)* US Department of Justice 83

Surat balasan Komisi Yudisial RI kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta sekaligus penunjukan delegasi 84

Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri oleh Kementerian Sekretariat Negara 85

Susunan awal rencana agenda kunjungan dan pertemuan selama di Amerika Serikat..... 86

Kata Pengantar

Dalam sebuah negara hukum, independensi hakim harus dipastikan dengan menyelenggarakan sistem pengawasan. Pengawasan hakim dibutuhkan guna menjamin akuntabilitas publiknya, ketaatannya pada hukum, serta ketaatannya pada norma-norma kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Pada saat yang sama independensi hakim harus dilindungi. Agar pada saat menjalankan tugasnya, hakim terbebas dari intervensi serta ancaman atau tindak kekerasan.

Perlindungan terhadap hakim di Indonesia disediakan pertama kali oleh hukum pidana, mulai dari Pasal 217 KUHP yang paling banyak dikenali sebagai *contempt of court*, serta pasal-pasal mengenai kejahatan terhadap penguasa umum yang berlaku pula bagi hakim, juga pasal-pasal ketentuan pidana umum di mana bukan mustahil hakim menjadi korbannya. Di dalam KUHP baru, perlindungan terhadap hakim juga diatur di beberapa pasal.

Perlindungan terhadap hakim berikutnya disediakan oleh hukum acara. Pasal 218 KUHP memberi otoritas mutlak bagi hakim ketua sidang untuk menegakkan tata tertib sidang, serta mencegah dan mengatasi gangguan sidang secara umum, baik oleh siapa pun yang ada di ruang sidang, maupun oleh terdakwa. Berbagai ketentuan hukum acara lainnya, seperti Pasal 372 HIR bagi sidang perdata, Pasal 68 dan 69 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Pasal 165 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur hal yang sama.

Pasal 48 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur soal jaminan keamanan hakim. Belakangan, perlindungan terhadap hakim turut diatur dalam produk regulasi MA, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 dan No. 6

Tahun 2020. Kedua Perma tersebut pada intinya mengatur larangan membuat gaduh serta larangan menghina hakim dan pihak-pihak lain di persidangan, juga mengatur infrastruktur dan prosedur dalam menjaga keamanan persidangan.

Selain itu, UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial pun menyediakan perlindungan tambahan bagi hakim melalui Pasal 20 ayat (1) huruf e. Dinyatakan bahwa, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial (KY) mempunyai tugas mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap pihak-pihak yang melakukan “perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim” atau yang disingkat dengan “PMKH”. Tugas tersebut oleh KY diturunkan ke dalam Peraturan KY No. 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim.

Sejak 2015-2023 KY telah menangani sedikitnya 123 dugaan PMKH dengan berbagai bentuk, mulai dari ancaman seperti teror yang dialami sejumlah hakim muda di PN Bengkalis, tekanan seperti yang dihadapi oleh majelis hakim dalam perkara pembunuhan Brigadir Joshua Hutabarat, kekerasan seperti yang dialami oleh hakim di PA Lumajang, demonstrasi berlebihan seperti di PN Dobo, perusakan fasilitas persidangan dan pengadilan, peretasan situs pengadilan, pemalsuan data putusan, hingga penghinaan terhadap hakim, dan lain-lain.

Meski norma Pasal 20 ayat (1) huruf e UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, bersifat *post factum*, di mana KY ditugaskan mengambil langkah penanganan pasca terjadinya peristiwa PMKH, namun dalam pengalaman KY terbukti bahwa pendekatan semacam itu tidak memadai. Perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan guna mempersempit peluang terjadinya PMKH. Langkah pencegahan yang paling signifikan adalah



koordinasi pengamanan pengadilan dan persidangan.

Di sepanjang 2022 dan 2023 KY telah melakukan observasi ke 123 pengadilan kelas IA, IB dan kelas II di seluruh Indonesia, dari lingkungan peradilan umum, agama dan PTUN. Tujuannya adalah untuk mengetahui pemenuhan berbagai infrastruktur dan prosedur bagi pengamanan pengadilan sebagaimana digariskan Perma 5 dan 6 Tahun 2020. Temuan dari observasi tersebut beragam, di mana kendala terbesar adalah minimnya anggaran, fasilitas, dan SDM. Temuan tersebut telah diadvokasikan KY lewat beberapa diskusi publik kepada Mahkamah Agung (MA), pemerintah (Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran), serta Komisi III DPR RI.

Guna melengkapi data dan pengetahuan tentang isu pengamanan hakim dan pengadilan (*court security*) KY atas dukungan *Office of Overseas Prosecutorial Development Assistance and Training* (OPDAT) Kedutaan Besar Amerika Serikat melakukan kunjungan studi ke Washington DC dan New York, Amerika Serikat, dengan topik “Keamanan Hakim dan Pengadilan di Amerika Serikat”, yang diikuti langsung oleh komisioner serta pejabat struktural dan fungsional KY. Kunjungan studi ini diselenggarakan antara 10-19 Juni 2023, dengan kegiatan berupa diskusi, pengamatan, dan simulasi dengan berbagai narasumber di 6 (enam) lembaga yang berbeda di Amerika Serikat.

Berbagai catatan, kesimpulan, dan refleksi dari kunjungan studi tersebutlah yang kemudian dituliskan ke dalam laporan yang dipublikasikan dalam bentuk buku ini. Selain menerbitkan buku, delegasi KY juga menyelenggarakan diskusi yang diikuti oleh segenap pegawai KY, termasuk kantor-kantor penghubung di 20 provinsi, selain mitra-mitra eksternal KY terpilih pada Rabu, 22 November 2023. Banyak pertanyaan kritis yang diajukan peserta, baik mengenai detail laporan, analisis tambahan oleh delegasi,

hingga tindak lanjut kegiatan ke dalam kebijakan baru ke depannya.

Penerbitan laporan dan penyelenggaraan diskusi tentang laporan tersebut adalah pola baru yang diterapkan KY sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik terhadap kunjungan studi luar negeri, yang tentunya menyerap sumber daya yang tidak sedikit. Dengan demikian siapa pun bisa mengetahui dengan jelas apa saja kegiatan yang dijalani delegasi KY selama durasi kunjungan, keterkaitannya dengan mandat dan agenda kelembagaan KY, jejaring yang berhasil dibangun, serta berbagai pelajaran (*lessons learned*) yang bisa dipetik dari kunjungan studi tersebut.

KY mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan yang diberikan oleh OPDAT bagi penyelenggaraan kunjungan studi ini. Terima kasih juga disampaikan kepada *The US Marshal Service* serta berbagai pengadilan distrik maupun federal di Amerika Serikat yang telah bersedia menjadi tuan rumah bagi kunjungan studi yang sangat produktif ini. Tidak lupa KY menyampaikan terima kasih kepada MA yang telah mengutus 2 (dua) orang hakimnya untuk menjadi kawan diskusi KY dalam pelaksanaan kunjungan studi, maupun bagi berbagai tindak lanjut yang akan dibuat.

Besar harapan kami, laporan ini bermanfaat bagi peradilan Indonesia maupun bagi masyarakat pada umumnya.

Jakarta, 1 Maret 2024

Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D.

*Anggota Komisi Yudisial RI/
Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan.*

BAB I

*Latar Belakang dan
Relevansi Kunjungan
Studi*

Bab 1

Latar Belakang dan Relevansi Kunjungan Studi

1. LATAR BELAKANG

Perubahan terhadap UU No. 22 Tahun 2004 dengan UU No. 18 Tahun 2011 memberikan seperangkat tugas dan kewenangan baru tentang Komisi Yudisial. Salah satunya adalah tugas untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.¹

Tugas yang diberikan secara atributif oleh undang-undang ini memperkuat mandat konstitusional yang dimiliki Komisi Yudisial berdasarkan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Mandat yang diberikan kepada Komisi Yudisial berupa wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Tugas mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain ini semakin memperkuat pemaknaan kebijakan hukum (*legal policy*) terkait mandat “*mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*”.

¹ Pasal 20 ayat (1) huruf e UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Dua tahun berselang setelah pengesahan UU No. 18 Tahun 2011, dengan kewenangan untuk menerbitkan peraturan secara mandiri (*self-regulating body*) yang dimiliki, Komisi Yudisial membentuk Peraturan Komisi Yudisial No. 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim. Untuk pertama kalinya, tugas mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain ini diberikan nomenklatur resmi dengan nama Advokasi Hakim.

Penerbitan peraturan operasional ini merupakan langkah maju meskipun tidak dapat dikatakan sempurna. Misalnya, pengertian Advokasi Hakim sebatas mengambil secara persis dari undang-undang, yaitu sebagai kegiatan dalam rangka mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Namun, terdapat juga upaya maju dalam arti memberikan pemaknaan terhadap apa yang dimaksud sebagai perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (selanjutnya disebut dengan PMKH), yang diartikan sebagai perbuatan orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang: 1) mengganggu proses pengadilan atau hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara; 2) mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan; 3) menghina hakim dan pengadilan.

Lebih lanjut, berdasarkan peraturan tersebut, pengertian operasional mengenai langkah hukum diartikan dengan melaporkan orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim kepada penegak hukum dan memantau proses hukum sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sementara itu, langkah lain berupa koordinasi, mediasi, konsiliasi, dan/atau somasi untuk

menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Dengan basis kerangka normatif tersebut, maka Komisi Yudisial menjalankan tugas Advokasi Hakim sejak 2013. Selama kurun waktu 2013 sampai hingga 2023, Komisi Yudisial sudah menangani 123 peristiwa PMKH. Dimulai dari 7 peristiwa pada 2013, 8 (2014), 10 (2015), 6 (2016), 10 (2017), 4 (2018), 12 (2019), 8 (2020), 12 (2021), 17 (2022) dan 21 (2023). Dari sisi bentuk PMKH, terdapat berbagai ragam seperti membuat keonaran atau kegaduhan di dalam ruang sidang, kegiatan unjuk rasa yang berlebihan, teror atau ancaman, kekerasan fisik, penyanderaan, perusakan sarana dan prasarana pengadilan, dan seterusnya.

Secara normatif, kegiatan penanganan PMKH oleh Komisi Yudisial bersifat *post factum* atau sesudah peristiwa PMKH terjadi. Hal ini terlihat dari rumusan norma dalam undang-undang, yaitu “... mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap..”. Dengan demikian, jika sebatas mengikuti ketentuan normatif, maka Komisi Yudisial hanya dapat bertugas ketika PMKH sudah terjadi.

Namun, Komisi Yudisial menyadari hal ini tentu tidak cukup dengan konteks empiris yang terjadi di praktik. Komisi Yudisial pun mengambil beberapa langkah *pre-emptif* yang bersifat *pre-factum*, salah satunya berupa koordinasi pengamanan dengan pihak kepolisian dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal ini terutama apabila Komisi Yudisial mendapatkan informasi lalu melakukan penilaian bahwa kuat dugaan PMKH akan terjadi.

Tidak hanya itu, Komisi Yudisial juga melakukan berbagai kegiatan pencegahan atau preventif terkait PMKH. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah menggalang sosialisasi terkait penghormatan terhadap hakim dan pengadilan. Kegiatan sosialisasi ini berupa konferensi pers, siniar (*podcast*), kunjungan media, sinergisitas dengan aparaturnya pengadilan,

penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat di berbagai daerah, dan seterusnya. Selain itu, kerjasama dengan berbagai pihak, terutama perguruan tinggi dan mahasiswa, juga diperkuat melalui kegiatan Klinik Etik dan Advokasi. Saat ini, 9 perguruan tinggi menjadi mitra Klinik Etik dan Advokasi Komisi Yudisial, yaitu Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, STH Indonesia Jentera, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum Sam Ratulangi dan Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Komisi Yudisial juga melakukan kegiatan pencegahan/preventif terkait PMKH melalui melakukan observasi terhadap penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan. Tahun 2022, Observasi dilakukan pada 51 pengadilan dari tiga lingkungan peradilan (umum, agama, dan tata usaha negara) di pengadilan kelas 1A atau kelas 1A khusus dengan penambahan dari beberapa pengadilan sekitar. Temuan dari observasi ini menunjukkan bahwa secara umum (70%) standard dalam Peraturan Mahkamah Agung sudah terpenuhi. Kelemahan terbesar terletak pada aspek anggaran dan sumber daya manusia pengamanan hakim dan pengadilan.

Hasil dari observasi telah diluncurkan oleh Komisi Yudisial dalam kerangka pembuatan dan perbaikan kebijakan. Untuk itu, saat peluncurannya, Komisi Yudisial tidak hanya menghadirkan Mahkamah Agung, tetapi juga perumus kebijakan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah (Kementerian PPN/Bappenas). Selain itu, dalam kerangka perumusan kebijakan, Komisi Yudisial sudah menyampaikan beberapa temuan, baik dari kegiatan penanganan maupun observasi, kepada Menteri Koordinator

bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, M. Mahfud MD. Temuan ini disambut positif dan direncanakan akan ditindaklanjuti dengan pembentukan forum koordinasi pengamanan hakim dan pengadilan di bawah koordinasi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Oleh karena itu, kunjungan studi (*study visit*) ini merupakan kegiatan yang memberikan nilai tambah dari berbagai upaya Komisi Yudisial yang sudah berlangsung selama ini. Berbagai informasi, observasi, serta pelajaran kunci yang diperoleh dari kunjungan studi ini menjadi bahan untuk mendorong kebijakan dan praktik keamanan hakim dan pengadilan yang lebih baik ke depan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kunjungan studi (*study visit*) ini adalah untuk menggali informasi sekaligus melihat langsung praktik pelaksanaan keamanan hakim dan pengadilan di Amerika Serikat. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

- ~ Mendapatkan informasi secara langsung dari pelaksana dan penerima manfaat mengenai keamanan hakim dan pengadilan di Amerika Serikat;
- ~ Memperoleh referensi terkait kelembagaan, tugas dan kewenangan, koordinasi, model, dan tantangan keamanan hakim dan pengadilan di Amerika Serikat; dan
- ~ Mengamati secara langsung serta mencatat praktik pelaksanaan keamanan hakim dan pengadilan di Amerika Serikat.

3. DASAR PEMILIHAN LOKASI

Pemilihan lokasi secara sengaja ditujukan kepada Amerika Serikat. Hal ini didasarkan pada asumsi umum bahwa keamanan hakim dan pengadilan di Amerika Serikat sudah berjalan secara mapan dan bahkan dicontoh di beberapa negara lain. Selain itu, dasar pemilihan lokasi juga dilakukan dengan pertimbangan adanya satu model kelembagaan khusus untuk pengamanan hakim dan persidangan, yaitu *US Marshals Service (USMS)*.

Pertimbangan lainnya adalah bahwa sudah ada studi yang dilakukan sebelumnya oleh *US Marshals Service* terhadap beberapa pengadilan di Indonesia. Delegasi menjadikan dua laporan sebagai bekal dan informasi awal, yaitu 1) Studi Proyek Keamanan Pengadilan di Indonesia oleh *US Marshals Service* pada 2012 dan 2) Studi Penilaian Keamanan Pengadilan Indonesia oleh *US Marshals Service* pada 2017.

4. KERJASAMA DENGAN OFFICE OF OVERSEAS PROSECUTORIAL DEVELOPMENT, ASSISTANCE AND TRAINING (OPDAT)

Kerjasama dengan OPDAT kemudian dijajaki untuk mengorganisir rencana kegiatan ini. Pihak OPDAT melakukan komunikasi dengan beberapa pihak yang relevan di Amerika Serikat, terutama *US Marshals Service* selaku pelaksana keamanan hakim dan pengadilan serta hakim atau pengadilan sebagai penerima manfaat dari pelaksanaan tugas keamanan tersebut. Kerjasama dilakukan melalui OPDAT di Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia di Jakarta.

5. DELEGASI

Delegasi dari kunjungan studi ini terdiri dari:

1. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum (Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia 2020-2023)
2. Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D (Anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia, Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Hukum, Advokasi, Penelitian dan Pengembangan)
3. Arie Sudihar, S.H., M.Hum (Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia)
4. Ir. Supriatna, MMSI (Kepala Biro Umum Komisi Yudisial Republik Indonesia)
5. Miko Ginting, S.H., M.A. (Tenaga Ahli merangkap Juru Bicara Komisi Yudisial Republik Indonesia)
6. Tabah Sulistyو, S.H., M.H (Penata Kehakiman Komisi Yudisial Republik Indonesia)
7. Kurniawan Desiarto, S.H., M.H (Penata Kehakiman Komisi Yudisial Republik Indonesia)

Kunjungan studi dalam kerangka kedinasan ini sudah disetujui oleh Kementerian Sekretariat Negara melalui Surat Nomor B-00001480/Kemensetneg/Ses/Simpel/05/2023, tertanggal 6 Mei 2023. Delegasi Komisi Yudisial juga sudah disambut dan diterima oleh Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Rosan Roeslani, beserta staf, di Kedutaan Besar Indonesia untuk Amerika Serikat di Washington, D.C, pada 13 Juni 2023. Selain itu, delegasi Komisi Yudisial juga disambut dan diterima Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York, Winanto Adi, beserta staf, pada 19 Juni 2023.

Selain delegasi dari Komisi Yudisial, pihak OPDAT turut menyertakan dua orang hakim dalam kunjungan studi ini, yaitu Dr. Henny Trimira Handayani, S.H., M.H (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dan Alex Adam Faisal, S.H (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur).

6. WAKTU DAN TEMPAT

Delegasi kunjungan studi ini bertolak dari Jakarta, Indonesia pada 10 Juni 2023 dan kembali ke Indonesia pada 19 Juni 2023.

Kunjungan studi ini secara garis besar mengambil lokasi di dua kota, yaitu Washington D.C. (*US Marshals Service, Administrative Office of the US Courts, dan Washington D.C Superior Court*) dan New York (*US District Court for the Eastern District Court of New York dan Daniel Patrick Moynihan, United States Courthouse*).

Seluruh agenda detail dari kunjungan studi ini tertera dalam lampiran dari laporan ini.

7. NARASUMBER DAN PIHAK YANG DIKUNJUNGI

Narasumber dari kunjungan studi ini terdiri dari:

Washington, D.C.

1. *US Marshals Service*
 - ~ *Judicial Security Division Management*
 - ~ *National Center for Judicial Security*
 - ~ *Office of Protective Operations (OPO)*

- ~ *Office of Protective Intelligence (OPI)*
 - ~ *Office of Threat Management*
 - ~ *Office of Security Systems (OSS)*
 - ~ *Office of Court Security (OCS)*
 - ~ *Judicial Support Center*
 - ~ *Office of Financial Management (OFM)*
2. *Administrative Office of the US Courts*
 - ~ *Tom Garrity dan tim*
 3. *Washington DC Superior Court*
 - ~ *Judge Marisa J. Demeo*

New York

1. *Federal Court in the Eastern District of New York*
 - ~ *US Marshals Service*
 - ~ *US Administrative Office of the US Courts*
 - ~ *Judge Brian Cogan*
 - ~ *Judge Kiyo Matsumoto*
 - ~ *Judge Pamela Chen*
2. *Daniel Patrick Moynihan United States Courthouse*
 - ~ *Judge Sidney H. Stein*
 - ~ *US Marshals Service*

Selain berdiskusi dengan para narasumber di atas, delegasi juga melakukan observasi langsung terkait keamanan hakim dan pengadilan di beberapa pengadilan, baik di Washington D.C. (Washington DC *Superior Court* dan *US Supreme Court*) maupun di New York (*Federal Court in the Eastern District of New York* dan *Daniel Patrick Moynihan United States Courthouse*). Selain itu, di *Daniel Patrick Moynihan United States Courthouse*, delegasi mengobservasi secara langsung pelaksanaan persidangan dan pengamanan terhadap hakim dan para pihak.

3. BATASAN DAN RUANG LINGKUP LAPORAN

Laporan ini memiliki ruang lingkup yang spesifik, yaitu sebagai laporan kunjungan studi terkait keamanan hakim dan pengadilan di dua kota di Amerika Serikat. Dengan demikian, laporan ini tidak berekspektasi menjadi sebuah laporan penelitian yang komprehensif mengenai topik tersebut, apalagi memberikan rekomendasi-rekomendasi spesifik mengenai model kelembagaan, anggaran, sumber daya manusia, koordinasi, dan seterusnya.

Namun, sebisa mungkin, laporan ini mencuplik beberapa hal yang bisa dijadikan pelajaran kunci bagi praktik keamanan hakim dan pengadilan di Indonesia. Pelajaran-pelajaran kunci ini bersifat informasi, baik sebagai informasi tambahan maupun informasi penguat, terhadap perbaikan desain dan praktik keamanan hakim dan pengadilan.

Laporan ini juga memiliki batasan, yaitu tidak adanya rekaman, baik audio maupun visual, dari observasi di pengadilan. Ketatnya prosedur keamanan di pengadilan di Amerika Serikat menjadi alasan utama keterbatasan ini. Dengan demikian, sekalipun delegasi mengobservasi secara langsung akses masuk,

tindakan sterilisasi pengunjung, ruang pengunjung (umum), ruang sidang, hingga akses darurat, tombol darurat, bahkan ruang tahanan sementara, informasi dari observasi tersebut tidak dapat digambarkan secara gamblang, termasuk memberikan contoh secara visual, dalam laporan ini.

Selain dari diskusi dan observasi, laporan ini juga dilengkapi dan dikembangkan melalui penelusuran terhadap informasi-informasi yang relevan secara lebih lanjut. Penelusuran dilakukan melalui medium internet yang juga memiliki batasan, yaitu terbatasnya sumber penelusuran atau peluang untuk ketidaktepatan konteks. Namun, sebisa mungkin informasi yang diperoleh sudah disaring sebagai informasi yang sah dan tepat untuk disajikan.

BAB II

*Lembaga Keamanan Hakim
dan Pengadilan di Amerika
Serikat*

Bab II

Lembaga Keamanan Hakim dan Pengadilan di Amerika Serikat

1. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN THE US MARSHALS SERVICE (USMS)

The United States Marshals Service (USMS) adalah lembaga keamanan yang bertugas untuk melindungi proses yudisial di Amerika Serikat. Dari sisi historis, lembaga ini memiliki sejarah panjang karena merupakan lembaga penegak hukum federal tertua di Amerika Serikat. Lembaga ini didirikan berdasarkan *the Judiciary Act* (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) pada 1789.

Pada awalnya, baru terbentuk 13 kantor *US Marshals Service* yang ditempatkan untuk beberapa wilayah federal. Generasi ini dikenal sebagai generasi *US Marshals Service* pertama yang diangkat oleh Presiden George Washington. Saat itu, untuk menjalankan tugasnya, mereka diizinkan untuk merekrut deputi khusus sebagai karyawan lokal atau mendapat bantuan dari aparat penegak hukum federal lainnya.

Perkembangan signifikan terhadap *US Marshals Service* secara kelembagaan terjadi pada 1969. Sebelum 1965, masing-masing pengadilan dapat membentuk Marshals sendiri secara independen. Baru pada 1969, yurisdiksi *US Marshals Service* diberlakukan secara nasional sebagai lembaga penegak hukum federal. Oleh karena itu, struktur *US Marshals Service* yang dikenal hari ini merupakan hasil perubahan pada 1969. Pada periode ini pula, terjadi beberapa dinamika kondisi internal di Amerika Serikat, yakni perjuangan gerakan hak-hak sipil di awal tahun 1960an. *US Marshals Service* turut memberikan perlindungan bagi kelompok Afro-Amerika dalam beberapa kasus terkait segregasi, seperti kasus James Meredith (1962) dan Ruby Bridges (1964).

Secara kelembagaan, *US Marshals Service* berada di bawah Departemen Kehakiman (*Department of Justice*) dan beroperasi di bawah kendali Jaksa Agung (*Attorney General*). Struktur hierarkis ini juga sama sebagaimana halnya lembaga penegak hukum federal lainnya, seperti DEA (*Drug Enforcement Administration*/Penegak Hukum Narkotika) atau FBI (*Federal Bureau of Investigation*/Biro Investigasi Federal). Secara umum, kekhasan tugas *US Marshals Service* berbeda dengan DEA dan FBI, yaitu *US Marshals Service* bertugas untuk memastikan keamanan proses peradilan, keamanan gedung pengadilan, melindungi hakim federal, para juri, dan anggota peradilan federal lain, serta memberikan perlindungan terhadap saksi.

Pada tahun anggaran 2022, *US Marshals Service* bertugas untuk melindungi 33.300 aparatur pengadilan. Ditambah pula, tugas memberikan perlindungan terhadap lebih dari 2.700 hakim yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara (*sitting judges*) dan 800 fasilitas pengadilan. Pada tahun yang sama, *US Marshals Service* melaksanakan penanganan terhadap 10 kasus perlindungan berbasis ancaman, 1.450 perlindungan perjalanan

aparatur peradilan, 111 kali pelatihan (dengan peserta 2.737 baik dari internal maupun eksternal pengadilan), serta 1.362 penyelidikan terhadap ancaman atau potensi ancaman terhadap orang yang dilindungi.



Fiscal Year 2022 – By the Numbers



- 33,300 Court Officials
- Over 2,700 Sitting Judges
- Over 800 Facilities
- 67 Million Sq. Ft Protected
- 3,168 Facility Incidents
- Over 1,700 HIDS participants

- 10 Threat-based Protection Details
- 1,450 Judicial Travel Briefs
- 111 Judicial Trainings
- 2,737 Students Trained (Internal and External)
- 1,362 threats and potential threats to protected persons investigated

Judicial Security Overview

2. STRUKTUR ORGANISASI US MARSHALS SERVICE

Seperti halnya FBI dan DEA, *US Marshals Service* sebagai lembaga penegak hukum memiliki struktur kelembagaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Eksekutif yang disebut dengan Direktur. Pengangkatannya dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan Senat. Direktur memiliki tanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan arahan bagi setiap tugas dan pelayanan *US Marshals Service*.

Adapun struktur organisasi *US Marshals Service* terdiri dari 3 (tiga) divisi besar, yaitu:

- 1.) Divisi Pertahanan (*Defense*) yang memiliki 3 (tiga) bagian:
 - a. *Office of Protective Operations* (OPO):

Suatu bagian yang memberikan perlindungan fisik dari *US Marshals Service*. Bagian ini memberikan dukungan berupa perlindungan kepada kantor-kantor distrik yang memiliki tingkat ancaman atau potensi kerawanan dan operasi perlindungan berbasis risiko atau ancaman, termasuk juga perlindungan kepada Wakil Jaksa Agung dan Direktur *US Marshals Service*.

OPO memberikan perlindungan dalam skala nasional, yang mencakup seluruh wilayah peradilan federal di seluruh negeri dengan kemampuan untuk memproyeksikan potensi ancaman atau kerawanan secara global.

b. Office of Court Security (OCS)

Bagian ini memiliki peran untuk merekrut *Court Security Officers/CSO* (pegawai keamanan pengadilan) dan membuat maupun mengawasi kontrak perusahaan keamanan yang menyediakan CSO. Bagian ini juga akan menempatkan CSO di pengadilan yang ada di Amerika Serikat.

c. Office of Security Systems (OSS)

Bagian ketiga dari Divisi Pertahanan ini adalah untuk melatih pegawai keamanan pengadilan dan membuat/mengawasi standar operasional prosedur keamanan pengadilan termasuk menyediakan peralatan keamanan untuk pengadilan, misal; kamera, alarm, metal detektor dan lain-lain.

2.) Divisi Siaga *Offensive*, yang memiliki 4 (empat) bagian, yakni:

a. *Judicial Support Centers*

Bagian pertama dari *Divisi Offensive* ini tersebar pada 6 (enam) wilayah dengan 16 kantor cabang dan menempatkan personil *US Marshal Service*. Bagian *Judicial Support Centers* juga melakukan riset intelijen terkait keamanan pengadilan. Selain itu, bagian ini juga dukungan operasional dan operasi perlindungan.

b. *Office of Threat Management*

Bagian ini memiliki tiga tugas atau fungsi utama, yakni Pertama, mengembangkan dan memelihara kebijakan pelatihan untuk perlindungan misi investigasi. Kedua, berfungsi sebagai pusat pengambilan dan koordinasi identifikasi potensi atau ancaman keamanan yang ditujukan terhadap orang-orang yang dilindungi oleh *US Marshals Service*. Ketiga, melakukan analisis perilaku yang mendukung investigasi terhadap ancaman di daerah dengan menyediakan analisis perilaku dari subyek.

c. *Office of Protective Intelligence (OPI)*

Bagian ini bertugas membuat buletin informasi, menerima informasi terhadap para hakim atau pegawai pengadilan yang akan mengadakan perjalanan ke luar negeri. OPI juga menerima atau mencari informasi tentang maskapai atau hotel yang akan digunakan. Dimana bagian ini juga dapat melakukan pengarahan intelijen terhadap potensi keamanan.

d. *The National Center for Judicial Security (TNCJS)*

Bagian ini menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan materi terkait keamanan pengadilan, perlindungan keluarga pengadilan dan menjamin supremasi hukum di seluruh dunia. TNCJS bisa juga mengawasi dan mengkoordinasikan semua permintaan dari negara manapun terkait keamanan peradilan, termasuk koordinasi kunjungan delegasi internasional.

3.) Divisi Pendukung (*Cross Divisional Support*) mempunyai 3 (tiga) bagian yaitu,:

a. *Office of Financial Management*

Sebagai Divisi Pendukung, bagian ini memiliki tugas untuk memelihara dan mengawasi anggaran tahunan, mengumpulkan dan mempublikasikan data anggaran dan membantu pembelian peralatan kebutuhan operasional.

b. *Administrative Support Center*

Bagian ini difungsikan untuk memelihara dan mengawasi kebutuhan administrasi, akses komputer dan akses pegawai yang keluar masuk kantor.

c. *Business Integration Center*

Bagian ini berfungsi untuk mengumpulkan informasi dan statistik yang relevan membuat dokumen pengarahannya baik untuk kantor, direktur, auditor eksternal dan lain-lain.

Berikut adalah gambaran dari 3 (tiga) divisi yang ada dalam USMS beserta bagian-bagian yang dimiliki tiap divisinya:

Headquarters Judicial Security Structure

Defense

- Office of Protective Operations
- Office of Court Security
- Office of Security Systems

Offensive

- Judicial Support Centers
- Office of Threat Management
- Office of Protective Intelligence
- The National Center for Judicial Security

Cross-Divisional Support

- Office of Financial Management
- Administrative Support Center
- Business Integration Center

3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB THE US MARSHALS SERVICE (USMS)

Tugas utama *US Marshals Service* adalah memberikan perlindungan terhadap:

1. Aparat pengadilan, yaitu hakim, panitera, juri, dan saksi. Termasuk juga dalam hal ini para pegawai pengadilan yang berada dalam masa percobaan kerja (*probation*);
2. Pengacara serta Jaksa;
3. Staf USMS sendiri; dan
4. Serta tugas lainnya yang berkaitan dengan proses persidangan. Misalnya, melakukan koordinasi dengan polisi setempat, pemerintah negara bagian, dan *Sheriff* terkait persidangan kasus-kasus tertentu.

Terkait tugas yang pertama, perlindungan yang diberikan kepada hakim tidak hanya perlindungan saat di kantor dan di rumah.

Perlindungan juga diberikan bagi hakim pada saat bepergian ke manapun, terutama ke luar kota dan luar negeri. Untuk itu, setiap detil perjalanan harus diberikan dan diketahui oleh *US Marshals Service*, seperti pihak yang akan ditemui, jadwal pesawat, rincian hotel, dan lain-lain. Detil ini juga akan disampaikan ke pihak-pihak lain yang berkepentingan demi menjamin keamanannya.

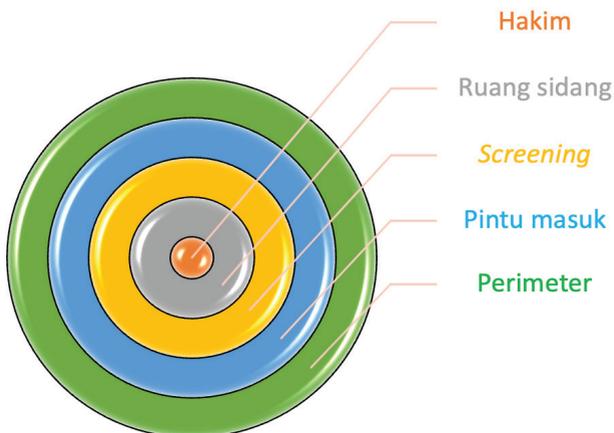
Salah satu contoh tugas yang keempat mengenai tugas lainnya berkaitan dengan proses persidangan adalah menjaga properti yang disita maupun memberikan perlindungan terhadap saksi. Selain itu, untuk menjamin perlindungan keamanan terhadap hakim, maka perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah kota mengingat pengamanan tidak hanya di dalam gedung pengadilan, melainkan juga akses jalan menuju kantor pengadilan. Jalan di depan kantor pengadilan perlu steril dari parkir kendaraan ataupun pejalan kaki dan kendaraan bermotor. Mereka yang berlalu lalang di jalan depan kantor pengadilan hanya mereka yang berkepentingan untuk mendatangi kantor pengadilan, baik yang akan bersidang atau mendaftarkan perkara.

Bagi mereka yang akan mendatangi kantor pengadilan dengan menggunakan kendaraan, maka mereka hanya dapat sampai di pos penjagaan yang diawasi oleh petugas keamanan dan dilanjutkan dengan berjalan kaki ke pintu masuk kantor pengadilan. Selanjutnya, mereka yang telah melalui pintu masuk (sudah berada dalam kantor pengadilan) tetap diawasi oleh petugas keamanan ataupun anggota *US Marshals Service* yang bertugas di pengadilan tersebut. Dengan demikian, perlindungan keamanan terhadap hakim dan pengadilan yang dilakukan *US Marshals Service* memiliki banyak lapisan. Mulai dari pos penjagaan di ujung jalan yang tepat di depan kantor pengadilan hingga ke ruang sidang.

Apabila memang diperlukan untuk pengamanan yang ekstra, maka satu sampai dua blok jalan juga diberlakukan pembatasan. Oleh karena adanya sterilisasi dan pembatasan sarana publik, maka perlu meminta izin kepada pemerintah dan kepolisian setempat, khususnya untuk membatasi akses kendaraan dan pejalan kaki.

Semenjak adanya tragedi 11 September 2001, tiap pemerintah daerah dan kepolisian setempat cenderung mendukung kebijakan perlindungan dan keamanan pengadilan. Apabila ada persidangan yang menarik perhatian publik dan berpotensi adanya ancaman terhadap keamanan hakim dan gedung pengadilan, maka biasanya pemerintah kota dan kepolisian memberikan izin untuk pembatasan sarana publik (jalan raya).

Pengamanan gedung pengadilan yang dilakukan oleh *US Marshals Service* dilakukan secara berlapis. *US Marshals Service* biasanya telah membuat gambaran atau visualisasi lapis keamanan gedung pengadilan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi potensi ancaman di kantor pengadilan. Lapisan keamanan gedung pengadilan dapat dilihat sebagaimana gambar di bawah ini.



Untuk melaksanakan tugas di atas, *US Marshals Service* juga merekrut *Court Security Officers/CSO* (pegawai keamanan pengadilan). Di Indonesia, CSO ini dikenal sebagai Satuan Petugas Keamanan (SATPAM). Perekrutan ini dilakukan oleh Divisi *Defense US Marshals Service* dengan melibatkan pihak ketiga. Pegawai keamanan atau CSO ini dipimpin oleh seorang *Chief* dan CSO ini bertanggung jawab kepada pihak ketiga (vendor atau kontraktor) dan *US Marshals Service*. Biasanya para CSO ini berlatarbelakang aparat penegak hukum (polisi) atau militer – dengan konteks polisi maupun militer di Amerika Serikat memiliki kontrak bertugas untuk jangka waktu tertentu.

Para pelamar sebelum terpilih sebagai CSO menjalani *screening* yang cukup ketat, terutama dengan memperhatikan riwayat hidupnya apakah ada atau tidaknya catatan kriminal. Proses seleksi menjadi seorang CSO cukup ketat mengingat tugas yang diemban oleh CSO juga cukup berat.

Saat ini, jumlah CSO telah mencapai \pm 5.700 personel yang ditempatkan pada pengadilan federal yang berjumlah lebih dari 400. Para CSO ini juga bertugas menjaga di area pintu masuk untuk mengawasi dan memeriksa setiap orang yang datang melalui *screening post* di area masuk kantor pengadilan. Semua orang yang datang ke kantor pengadilan wajib diperiksa secara seksama terlebih dahulu. Pada saat dilakukan *screening*, CSO memastikan agar setiap pengunjung pengadilan dilarang membawa alat komunikasi, alat perekam, maupun alat-alat lain yang dapat memancarkan sinyal. Untuk itu, para CSO ini juga dibekali kewenangan pemolisian secara terbatas, seperti melakukan pemeriksaan dan pengegedahan, baik terhadap barang maupun badan.

Khusus layanan antar paket atau sejenisnya, maka CSO menerapkan protokol atau standard operasional prosedur dalam rangka mengamankan layanan antar, termasuk identifikasi pengantar serta *screening* terhadap surat atau paket yang akan masuk ke kantor pengadilan. Kebijakan *screening* dan daftar barang terlarang telah dituliskan secara jelas dan disampaikan oleh CSO saat orang masuk ke lobi pengadilan. CSO berwenang melarang orang yang tidak berkepentingan untuk masuk. Selain menjaga di ruang sidang, para CSO bersama *US Marshals Service* bertanggung jawab untuk keamanan seluruh area pengadilan.

Secara berkala *US Marshals Service* dan CSO berpatroli selama 24 jam di kantor pengadilan dalam rangka menjaga keamanan gedung. Untuk mendukung kualitas keamanan gedung pengadilan dan hakim termasuk pegawai pengadilan lainnya, CSO mengawasinya selama 24 jam mealui CCTV (*Closed Circuit Television*) yang ditempatkan pada setiap sudut area pengadilan, termasuk ruang sidang. Tidak ada area pengadilan yang tidak termonitor oleh CCTV. Pada ruang kontrol, 2 (dua) orang CSO ditugaskan selama 24 jam. Adapun jangka waktu penyimpanan (retensi) rekaman video adalah selama ± 1 (satu) bulan. Pelaksanaan tugas ini dilakukan di bawah koordinasi Divisi *Defense US Marshals Service*.

Sementara itu, bagi CSO yang bertugas menjaga ruang sidang, biasanya dalam persidangan ditempatkan dua sampai dengan empat orang CSO. Mereka bertugas untuk siaga mengawasi jalannya persidangan dan mengamankan jalannya persidangan. Para CSO yang berada dalam ruang persidangan saat sidang diselenggarakan dipimpin oleh satu atau dua orang anggota *US Marshals Service*. Para CSO yang bertugas biasanya ditempatkan dekat hakim maupun podium tempat saksi memberikan keterangan dan pintu masuk ruang sidang. Semua petugas *US Marshals*

Service maupun CSO dilengkapi atribut pengenal berupa lambang serta peralatan komunikasi.

Terkait tahanan yang akan dibawa ke ruang sidang, *US Marshals Service* bekerjasama dengan petugas tahanan atau DEO (*Detention Enforcement Officers*). Mulai dari urusan administrasi dan fisik tahanan hingga membawanya ke ruang sidang. Pada saat menunggu sidang, tahanan ditempatkan di sel tahanan yang berada di dalam kantor pengadilan. Saat sidang, tahanan dibawa ke dalam ruang sidang yang dikawal oleh *US Marshals Service* dan CSO melalui lorong atau jalur khusus yang memang diperuntukkan bagi para tahanan. Hanya saja, tidak semua distrik memiliki DEO. Bagi distrik yang tidak memiliki DEO, maka *US Marshals Service* yang membawa tahanan ke kantor pengadilan dan ke ruang sidang bersama CSO.

Untuk menunjang layanannya, selain melakukan pengamanan dan koordinasi pengamanan, *US Marshals Service* juga melakukan training atau pelatihan. Kegiatan pelatihan ini dilakukan di bawah koordinasi *Divisi Offensive* yang memiliki Pusat Nasional untuk Pengamanan Kehakiman (*National Center for Judicial Security*). Pusat Nasional ini memberikan pelatihan untuk peningkatan skill dan pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan keamanan pengadilan. Pelatihan ini diperuntukkan tidak hanya bagi kalangan internal *US Marshals Service*, melainkan juga pihak aparat pengadilan beserta keluarganya.

Terakhir, yang tidak kalah pentingnya dengan dua divisi sebelumnya adalah Divisi Pendukung/Penunjang. Dalam Divisi ini, terdapat Pusat Kegiatan yang Terintegrasi yang bertugas mengumpulkan statistik dan informasi yang relevan untuk membuat suatu dokumen pengarah atau panduan bagi Direktur

US Marshals Service, auditor eksternal, lembaga eksternal, dan lain-lain.

Selain itu, Divisi Pendukung juga memberikan layanan kepada divisi lain berupa pengelolaan anggaran tahunan *Judicial Security District/JSD*. Selain itu, Divisi ini juga bertugas memberikan dukungan untuk membantu pembelian peralatan dan kebutuhan operasional yang dilakukan oleh bagian Pusat Integrasi Kegiatan, bagian manajemen keuangan, dan bagian pusat pendukung administratif.

BAB III

*Observasi Praktik Keamanan
Hakim dan Persidangan
di Amerika Serikat*

Bab III

Observasi Praktik Keamanan Hakim dan Persidangan di Amerika Serikat

1. **OBSERVASI DAN KUNJUNGAN KE ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS, THURGOOD MARSHALL FEDERAL JUDICIAL BUILDING, WASHINGTON D.C.**

Pada 13 Juni 2023, delegasi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung berkunjung ke kantor *Administrative Office of the US Courts* di Thurgood Marshall Federal Judicial Building, 1st Columbus Circle NE, Washington DC, 20002 dan Washington DC Superior Court 500 Indiana Avenue NW, Washington DC 20001.



Tujuan dari kunjungan ini pada dasarnya adalah untuk menindaklanjuti dari paparan yang telah dilakukan di kantor *US Marshals Service* sehari sebelumnya. Pada kesempatan ini, Komisi Yudisial ditemui langsung oleh Ketua *Judiciary Security Division*, Tom Garrity, beserta penasehat dan beberapa stafnya. *Judiciary Security Division (JSD)* memiliki visi dan misi sebagai berikut:

VISI

“Memfasilitasi pemenuhan keamanan dan program manajemen darurat dan pelayanan dalam lingkup *Administrative Office of the U.S. Courts (AO)* and peradilan melalui koordinasi dengan *US Marshals Service (USMS)*, *Federal Protective Service (FPS)*, *General Services Administration*, pemerintah lokal, serta lembaga yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan publik”

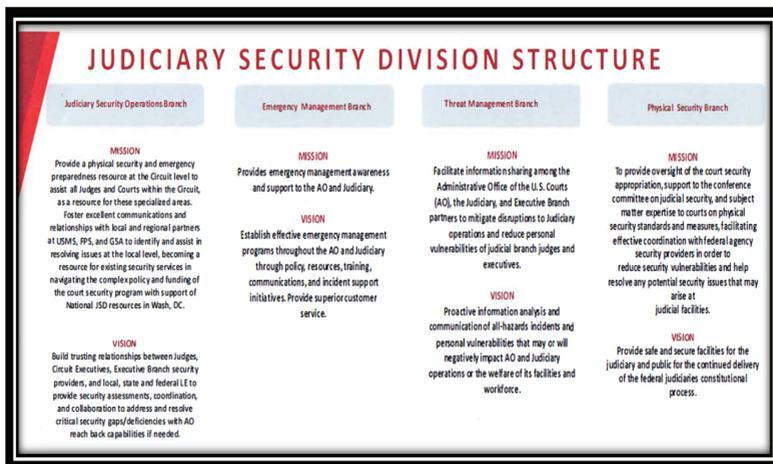
MISI

“Menerapkan sebuah model program keamanan yang dapat mengurangi kerentanan dan ancaman terhadap peradilan melalui peningkatan terhadap pemenuhan aspek keamanan yang kritis dan program keselamatan hidup”

Dari visi misi JSD di atas, terlihat jelas bahwa fungsi kolaborasi menjadi visi utama dari lembaga ini. JSD berfungsi untuk menghubungkan antara *Administrative Office of the U.S. Courts (AO)* dan pengadilan melalui suatu mekanisme koordinasi dengan *U.S. Marshals Service (USMS)*, lembaga penegak hukum federal terkait fasilitas publik atau *Federal Protective Service (FPS)*, layanan administrasi umum dan pemerintahan setempat serta lembaga keamanan/keselamatan Publik, dan lembaga keamanan lain.

Melalui *vulnerability management program*, JSD berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan sumber daya dari AO. Pada 2021, JSD mendorong kerjasama antara AO dengan hakim dan pejabat pengadilan. Hasil dari kerjasama ini akhirnya menghasilkan dua unit baru di bawah JSD sehingga saat ini total ada empat cabang struktur organisasi dalam JSD:

1. *Judiciary Security Operations Branch* (cabang yang mengurus operasional);
2. *Emergency Management Branch* (cabang yang bertugas untuk keadaan darurat);
3. *Threat Management Branch* (cabang yang mengurus manajemen ancaman); dan
4. *Physical Security Branch* (cabang yang mengurus keamanan fisik).



Dari pertemuan ini dapat disimpulkan bahwa Amerika Serikat telah memiliki dukungan sistemik yang mapan dan terkoordinasi terkait pengamanan hakim dan peradilan. Pembagian tugas yang jelas serta koordinasi erat antara *US Marshals Service* dan AO serta lembaga lain menjadi kunci memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas pemenuhan keamanan hakim dan pengadilan. Keberadaan lembaga koordinatif ini penting karena dapat mendukung tugas pokok *US Marshals Service* sebagai pelaksana lapangan dalam melakukan pengamanan terhadap warga peradilan.

2. WASHINGTON D.C. SUPERIOR COURT

Pada rangkaian pertama kunjungan ke pengadilan untuk mengamati dan mengobservasi secara langsung praktik keamanan hakim dan pengadilan, delegasi mendatangi *Washington D.C. Superior Court*, yang terletak di 500 Indiana Avenue NW, Washington DC 20001. Lokasi ini bertempat di tengah kota dan

pusat keramaian. Meski demikian, sudah terlihat adanya perimeter pertama yang berlapis untuk masuk ke dalam area pengadilan. Pada perimeter pertama sebelum memasuki area pengadilan telah tersedia pos-pos saringan awal (terlihat dalam gambar) serta tiang-tiang beton dan besi (*bollard*) yang ditempatkan di depan gedung guna menghalau kendaraan berat untuk masuk/menabrakkan diri.

Media massa dengan kamera bisa meletakkan peralatannya pada bagian terluar dari gedung pengadilan. Media massa dengan kamera dan perekam tidak diizinkan melakukan peliputan di dalam gedung pengadilan. Hanya media tulis yang diperkenankan melakukan peliputan secara langsung. Namun, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, semua risalah persidangan dimuat di situs resmi pengadilan sehingga pihak yang berkepentingan tetap dapat mengikuti jalannya persidangan.



Credit: <https://michaelmarshalsdesign.com/project/district-of-columbia-superior-court/>

Dari observasi di pengadilan ini, diperoleh gambaran mengenai ketatnya pengamanan pengadilan. Dari awal memasuki gedung, delegasi diperlakukan layaknya sebagai pengunjung pengadilan, dengan peraturan yang sama sesuai pengunjung pada umumnya.

Delegasi diharuskan meninggalkan seluruh perangkat elektronik (hape, alat rekam, kamera, dan lain-lain). Pengecualian hanya diberikan kepada mereka yang memiliki izin (*clearance*), seperti jaksa, penasehat hukum, dan petugas pengadilan. Selanjutnya, semua barang bawaan akan memasuki proses *scanning* dengan *metal detector* dan *scanner detector*. Terlihat petugas pengamanan bersiaga dan mengamati setiap gerak-gerik di pintu masuk tersebut.

Setelah dapat masuk ke dalam gedung pengadilan, para pengunjung melihat papan informasi elektronik yang berisikan jadwal dan ruangan sidang beserta hakim yang akan menangani dan para pihak dalam perkara tersebut. Ruangan sidang bersifat tetap, misalnya hakim A akan menempati ruang sidang X. Ruang sidang yang tidak dipakai secara bergantian ini berguna bagi sterilisasi ruang sidang dari potensi ancaman.

Apabila sidang berlangsung, petugas *US Marshals Service* dan CSO ditempatkan. Para petugas ini biasanya akan duduk di barisan paling belakang dan depan di sekitar hakim. Kelengkapan CCTV juga disiagakan, mulai dari bagian atap saat memasuki gedung, di seluruh area dalam gedung, dan di dalam ruang persidangan.

Desain tata letak ruang persidangan ini menjadi perhatian delegasi, di mana selain letak meja hakim yang lebih tinggi dan menghadap ke arah bangku pengunjung (*gallery*) dan pintu masuk, tata letak dari meja juri hingga meja terdakwa juga

mempertimbangkan aspek keamanan. Di sebelah meja hakim, terdapat pintu khusus hakim yang mengarah ke ruang hakim. Ruang hakim ini hanya ditempati oleh satu hakim. Pintu khusus ini hanya bisa diakses oleh hakim sendiri dan petugas yang diberi izin. Selain itu, terdapat juga *panic button* yang berada di bawah meja hakim untuk memanggil petugas *US Marshals Service* dan tim keamanan apabila terjadi keadaan darurat.

Lebih lanjut, delegasi juga dapat melihat keberadaan dan kelengkapan ruang tahanan sementara yang terletak di sebelah ruang sidang. Jalur untuk tahanan ini langsung dari lapangan parkir bawah dan menggunakan lift khusus untuk sampai ke ruang tahanan atas di sebelah ruang sidang. Ruang tahanan ini berguna sebagai ruang tunggu sehingga tidak ada kesempatan untuk menjenguk. Namun, terdapat ruang khusus bagi penasehat hukum dan tahanan untuk berkomunikasi. Semua komunikasi ini bersifat rahasia karena



dilindungi oleh *client-attorney privilege*. Dalam ruang tahanan, terdapat fasilitas sederhana berupa tempat duduk dan toilet. Satu sel tahanan dapat diisi tiga sampai lima orang tahanan. Umumnya terdapat tiga sampai empat sel untuk satu area khusus ini. Petugas *US Marshals Service* bertugas untuk menjaga para tahanan, mulai dari rumah tahanan, dihadirkan di muka persidangan, hingga kembali lagi ke rumah tahanan. Dalam kunjungan ke *Washington D.C. Superior Court*, delegasi mendapatkan kehormatan untuk bertemu dengan salah satu hakim, yaitu Marisa J. Demeo, yang merupakan seorang *Associate Judge of the Superior Court of the District of Columbia*. Dalam kesempatan pertemuan dengan delegasi, Hakim Demeo menceritakan beberapa hal terkait latar belakangnya sebagai imigran (Mexican–American) dan tantangannya menjadi hakim selama ini.

Dalam keterangannya, beliau menjelaskan program-program perlindungan dan keamanan hakim yang disediakan baginya. Namun, satu titik tekan yang ia berikan adalah bahwa pada hakekatnya hakim adalah anggota masyarakat yang juga berinteraksi seperti warga pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari.

Program perlindungan yang ada selama ini sudah sangat baik. Namun, menurutnya, semua program perlindungan itu kembali kepada hakim yang bersangkutan apakah ingin menerima atau menolak.

Menurutnya, salah satu hal yang sangat jarang dilakukan di Amerika adalah persidangan tertutup meskipun untuk alasan keselamatan. Kepercayaan publik memerlukan keterbukaan dalam persidangan. Selain itu, menurutnya, kunci keamanan hakim juga terletak pada kemampuan mengelola komunikasi di ruang persidangan karena pada intinya para pihak hanya ingin diberikan

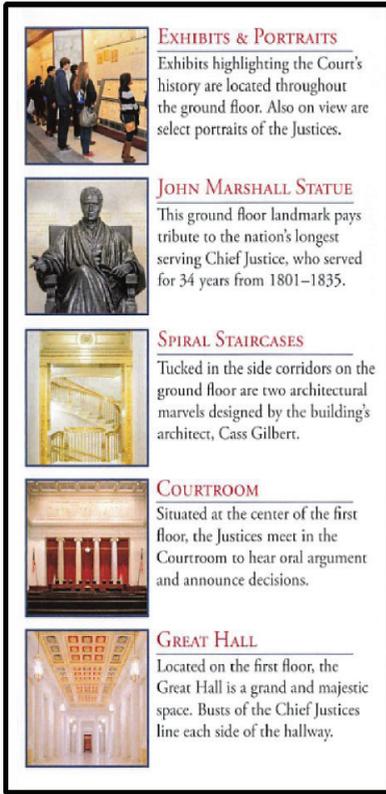
kesempatan untuk didengarkan (*to be heard*).

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa program-program keamanan yang disediakan *US Marshals Service* baginya terdiri dari proteksi di ruang persidangan hingga kediaman. Di kediaman, misalnya dipasang kamera CCTV beserta alarm darurat yang terhubung ke penegak hukum. Namun, menjadi tantangan baginya, karena ia tinggal di apartemen yang memiliki standard sendiri yang tidak bisa diubah, seperti lift, pintu masuk, dan sebagainya. Menurutnya, di Amerika Serikat, hakim menempati kediaman pribadi dan negara tidak menyediakan rumah dinas kepada hakim.

3. SUPREME COURT, 1ST STREET NE, WASHINGTON DC

Pada 14 Juni 2023, delegasi berkunjung ke kantor *Supreme Court*, 1st Street NE, Washington DC, 20543. Secara umum kunjungan ke Mahkamah Agung Amerika Serikat ini bersifat informal. Delegasi diberikan penjelasan mengenai sejarah dan tugas dan kewenangan Mahkamah Agung Amerika Serikat.

Dalam kunjungan ini, selain melakukan observasi keamanan Mahkamah Agung, delegasi dapat melihat ruang sidang hakim agung serta beberapa fasilitas lainnya. Satu informasi yang relevan pada kunjungan ini adalah bahwa Mahkamah Agung juga sedang menyiapkan model khusus yang lebih ketat terkait keamanan hakim dan pengadilan. Hal ini utamanya dipengaruhi oleh kerusuhan yang terjadi di Capitol Hill pada 6 Januari 2021. Saat itu, gedung parlemen Amerika Serikat ini diduduki oleh lebih dari 2000 massa. Gedung Capitol Hill berada persis di sebelah gedung Mahkamah Agung dan dalam satu area (perimeter) yang sama.



Selain itu, informasi yang menarik lainnya adalah tetap dilakukan pembatasan terhadap pengambilan foto dan video sekalipun tidak ada persidangan. Hal ini terutama pada area-area tertentu, seperti ruang sidang, ruang pertemuan hakim, dan sebagainya. Pengambilan foto hanya bisa dilakukan di area-area tertentu yang memang dikhususkan sebagai ruang pameran. Meski demikian, semua informasi mengenai persidangan termasuk risalah persidangan secara *verbatim* tersedia di situs resmi. Jurnalis tulis juga diberikan akses, termasuk bangku khusus, untuk mengikuti persidangan.

4. **FEDERAL COURT IN EASTERN DISTRICT OF NEW YORK**

Pada 15 Juni 2023, delegasi beranjak dan mengunjungi *Federal Court* in Eastern District of New York 223 Cadman Plaza E., Brooklyn. Jarak antara Washington D.C. dengan New York ditempuh sekitar 3 jam menggunakan kereta api.

Sebagaimana kunjungan ke pengadilan sebelumnya, perimeter pengamanan awal telah terlihat sebelum memasuki



gedung pengadilan. Satu hal yang menarik adalah area gedung pengadilan ini berada di area publik. Persis di depan gedung pengadilan terdapat taman publik. Dengan demikian, pembatasan secara penuh tidak mungkin untuk dilakukan.

Oleh karena itu, pos pengamanan di depan pengadilan dikerjasamakan dengan pemerintah setempat. Terlihat penempatan tiang pancang (*bollard*) dan pagar besi di sekeliling taman kota. Penempatan sarana pengamanan ini membutuhkan izin dari pemerintah kota setempat.

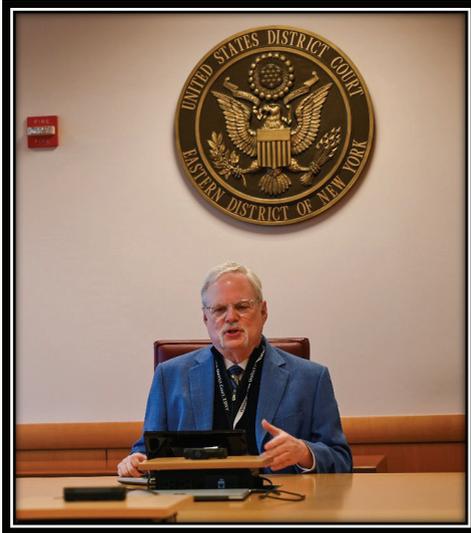
Pada bagian selanjutnya, kaca pintu masuk pengadilan merupakan kaca antipeluru dan memiliki ketahanan terhadap bahan peledak sampai dengan kekuatan tertentu. Selain itu, pintu masuk dibuat berlapis sebagai perisai keamanan apabila ada pihak tertentu yang ingin masuk ke gedung pengadilan. Model ini didasarkan pada pengalaman masa lalu di Amerika Serikat, terutama kasus Bom Oklahoma pada 1995. Saat itu terjadi peledakan bom di area pemerintahan kota dengan menggunakan truk. Korban jiwa mencapai 168 orang dan 680 orang luka-luka. Bom ini juga meluluhlantakkan hampir seluruh bangunan di area itu.



Konteks lainnya adalah bahwa pengadilan ini menangani kasus-kasus yang cukup serius dan membutuhkan pelibatan pertimbangan keamanan hakim dan persidangan yang besar. Kasus-kasus yang ditangani pengadilan ini mulai dari kasus narkoba hingga pencucian uang.

Sama dengan pengadilan sebelumnya, sebelum masuk ke area dalam gedung, para pengunjung tidak boleh membawa *handphone* dan alat elektronik lainnya. Pada pintu masuk telah berjaga tenaga pengamanan. Semua area termasuk di atas pintu masuk sebelum ke gedung pengadilan berada di bawah pantauan CCTV.

Pada kunjungan ke Pengadilan *Federal Court* in Eastern District of New York, delegasi mendapat kesempatan bertemu dengan Hakim Brian Cogan. Sebelum ditunjuk oleh George W. Bush sebagai hakim dengan persetujuan Senat, beliau merupakan seorang pengacara. Pada 2006, beliau diangkat menjadi hakim. Dalam karirnya sebagai hakim, salah satu kasus monumental yang



pernah ditangani beliau adalah kasus El Chapo.

El Chapo (Joaquin Guzman) merupakan pemimpin kartel narkotika asal Meksiko. Sebagai pemimpin kartel narkotika, ia memiliki pasukan dan pengikut setia, sehingga pengamanan yang diberikan kepada Judge Cogan bersifat

sangat ekstra dan masih berlanjut hingga tiga bulan pasca putusan pengadilan.

Pada masa persidangan, pengamanan ekstra dilakukan, termasuk penggunaan kendaraan antipeluru juga digunakan dalam perjalanan dari kediaman menuju pengadilan. Selain itu, strategi pengamanan juga dilakukan dengan menggunakan rute perjalanan pulang-pergi kerja yang berubah-ubah. Termasuk penggunaan kendaraan samaran, seperti taksi yang sebenarnya dikendarai oleh personel pengamanan.

Hal yang menarik, ketika di tengah proses pemeriksaan persidangan, Judge Cogan melangsungkan pernikahan anaknya. Ia sudah menyatakan *US Marshals Service* tidak perlu melakukan pengamanan. Namun, standard pengamanan harus tetap diberikan. Oleh karena itu, saat itu petugas *US Marshals Service* melakukan penyamaran sebagai tamu dan panitia pernikahan.

Selama persidangan kasus El Chapo, *Judge Cogan* merasa tidak ada hal yang mengkhawatirkan dan berbahaya. Bahkan, menurutnya El Chapo menunjukkan sikap yang hormat terhadap hakim dan persidangan, terlepas dari kasus yang dituduhkan kepadanya. Hal ini melegakan dirinya sebagai hakim. Menurutnya, salah satu faktor kunci kondusivitas persidangan ini adalah karena ia mampu berkomunikasi dan memberikan kesempatan yang sama (*fair*) bagi para pihak untuk mengajukan dalil dan membela diri.

Menurut pengalamannya, justru yang lebih berbahaya adalah ketika mengadili kasus “*Pro se*”, yaitu terdakwa yang membela dirinya sendiri di muka persidangan. Menurutnya, kasus dengan tipe ini justru lebih sulit dan membutuhkan kemampuan pengelolaan persidangan yang lebih ekstra.

Kesempatan selanjutnya, delegasi dapat bertemu dengan *Judge Kiyoko Matsumoto* and *Judge Pamela Chen*. Salah satu poin penting dari beliau adalah sudut pandang perempuan dalam keamanan hakim dan persidangan. Menurut para hakim ini, menjadi hakim di Amerika Serikat tidak mengakibatkan kehidupan privasi mereka terganggu. Salah satu program yang disediakan *US Marshals Service* yang membantu mereka adalah program “*delete*” yang menjaga privasi hakim dan keluarga di dunia maya. Dengan program ini, semua informasi pribadi, seperti alamat, *geotagging*, foto plat nomor kendaraan, ataupun wajah keluarga dan hakim sendiri dibantu dilindungi privasinya. Tujuannya adalah agar tidak disalahgunakan atau bahkan dapat dijadikan petunjuk bagi mereka yang berniat buruk.

Sekali lagi, dari pertemuan ini, terdapat penegasan bahwa hakim merupakan penentu atas kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan oleh *US Marshals Service*. Sebagai contoh, dikarenakan *Judge Kiyoko Matsumoto* and *Judge Pamela Chen*



tinggal di apartemen, maka paket keamanan berupa alarm set dan CCTV dari USMS dapat mereka tolak karena tidak urgen untuk kehidupan di kediamannya. Para hakim tidak canggung maupun khawatir terkait keamanannya bahkan mereka pulang pergi kerja dengan *commuting* menggunakan kereta atau kendaraan umum, berbelanja, maupun liburan. Dari pertemuan ini, diperoleh juga informasi bahwa pengamanan terhadap hakim juga dilakukan untuk kegiatan ke luar negeri. *US Marshals Service* mempunyai program *international outreach* ketika para hakim harus menghadiri kegiatan di luar negeri.

Delegasi juga diberikan kesempatan untuk melihat proses sidang secara langsung di pengadilan ini. Terkait pengamanan hakim dan persidangan, terlihat dua orang petugas dengan prinsip *one on one*, yaitu satu orang fokus pada satu orang ditambah satu orang petugas lagi di dalam satu ruang sidang. Dari jalannya sidang, terlihat marwah hakim sangat dihargai oleh para pihak. Hakim terlihat sangat kompeten dan mampu mengelola jalannya persidangan. Hakim pada perkara ini adalah Denny Chin, yang salah

satunya pernah memeriksa dan memutus perkara Bernie Madoff yang terkenal dengan skema penipuan Ponzi. Kepercayaan publik serta kompetensi hakim dalam mengelola persidangan terlihat secara langsung sebagai faktor penentu keamanan terhadap hakim dan pengadilan.

5. US DISTRICT COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

Pada 16 Juni 2023, delegasi berkunjung Pengadilan di *Southern District of New York*. Perimeter pengamanan awal cukup berjarak dari gedung pengadilan (kurang lebih 800 meter). Berbeda dengan pengadilan sebelumnya, sisi depan gedung pengadilan sangat terisolasi. Namun, sisi sebaliknya berbatasan langsung dengan jalan raya dan taman kota.

Semua tamu akan disisir di awal perimeter ini. Kendaraan



umum tidak diperbolehkan melewati atau parkir di area pengadilan. Delegasi disambut oleh *Marshals* Shaleh di mana diterangkan bahwa di seberang gedung pengadilan yang baru adalah gedung pengadilan lama. Dari keterangannya, tidak semua pengadilan di Amerika Serikat memiliki fasilitas yang sama. Bahkan di beberapa daerah masih memberlakukan penutupan lift untuk umum ketika seorang tahanan dibawa ke ruang sidang. Hal ini dikarenakan fasilitas di pengadilan belum memiliki lift terpisah.

Delegasi memasuki gedung pengadilan dengan standard, model, dan penempatan personel yang serupa dengan kunjungan ke pengadilan sebelumnya. Terdapat *metal detector*, *scanner*, dan pemeriksaan barang bawaan di pintu masuk. Delegasi juga melakukan diskusi terkait pengamanan persidangan dengan hakim senior, Sidney H. Stein yang juga didampingi seorang jaksa muda. Informasi yang diperoleh bahwa subjek perlindungan di lokasi pengadilan bukan hanya hakim, tetapi juga seluruh warga pengadilan, termasuk jaksa.

Dari diskusi juga terlihat bahwa area hakim adalah area steril. Meskipun sudah bekerja cukup lama di pengadilan ini, baru kali jaksa yang hadir di diskusi ini menggunakan lift, berjalan di area, serta masuk ke ruangan khusus hakim. Hal ini pun dikarenakan ada kepentingan mengejar waktu untuk bertemu delegasi dan ditemani oleh petugas. Selama ini, selain hakim tidak boleh atau sangat dilarang ada yang menggunakan area tersebut.

Selain itu, delegasi juga melakukan observasi terhadap seluruh fasilitas keamanan terhadap hakim dan pengadilan lainnya. Temuan dari observasi langsung ini sama dengan informasi yang sudah diperoleh dari kunjungan ke pengadilan sebelumnya, mulai dari penempatan petugas *US Marshals Service* ketika persidangan berlangsung, akses dan ruang tunggu tahanan sebelum dihadirkan

ke muka persidangan, pintu dan ruang khusus bagi hakim, tombol alarm di bawah meja hakim, penempatan CCTV, dan seterusnya.

Salah satu informasi menarik yang diperoleh dari Hakim Sidney H. Stein adalah bahwa kunci keamanan hakim adalah kepercayaan para pihak dan publik serta kemampuan berkomunikasi dan mengelola persidangan. Ia juga memberikan kritik terhadap langkah pengamanan oleh *US Marshals Service* yang dalam beberapa situasi cenderung berlebihan.



BAB IV

*Pelajaran Kunci dari Desain
dan Implementasi Keamanan
Hakim dan Pengadilan
di Amerika Serikat*

Bab IV

Pelajaran Kunci dari Desain dan Implementasi Keamanan Hakim dan Pengadilan di Amerika Serikat

1. KONTEKS KEAMANAN HAKIM DAN PERSIDANGAN DI AMERIKA SERIKAT

Konteks di Amerika Serikat ini sangat penting agar desain dan implementasi keamanan hakim dan pengadilan diletakkan pada situasi tertentu yang khas. Tanpa mempertimbangkan konteks ini, maka desain dan implementasi keamanan hakim dan pengadilan dapat berujung pada semata ketertutupan (*closeness*). Padahal, hakim dan pengadilan perlu juga untuk bersikap terbuka dan memberikan kesan terbuka karena dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadapnya. Dengan demikian, keseimbangan antara aspek keamanan dengan keterbukaan perlu menjadi pertimbangan utama bagi desain dan implementasi keamanan hakim dan pengadilan.

Desain dan implementasi keamanan hakim dan persidangan di Amerika Serikat begitu ketat. Sebagaimana yang kita lihat di bagian observasi, mulai dari pintu masuk hingga area lokasi sidang didesain dengan sangat terencana untuk mendukung keamanan bagi hakim dan warga peradilan. Misalnya, baru di area terluar pengadilan, kita bisa menemukan penjagaan yang ketat dengan peletakan tiang pancang (*bollard*) dan pagar otomatis dengan penjaga. Sebelum masuk ke area dalam pengadilan, terdapat pintu anti peluru dan anti bom secara berlapis. Baru selangkah masuk, kita juga akan disambut oleh metal detector dan *x-ray scanner* dengan petugas berseragam yang berjaga. Begitu juga dengan CCTV yang mengawasi semua area pengadilan.

Ketatnya keamanan ini tidak dapat dipisahkan dari peristiwa masa lalu di Amerika Serikat. Misalnya, yang paling membekas di benak masyarakat Amerika Serikat adalah peristiwa Bom Oklahoma pada 1995. Peristiwa ini sangat menjadi momok kekhawatiran karena target peledakan bom saat itu adalah area kantor pemerintah (termasuk pengadilan). Bom dibawa dengan truk dan meluluhlantakkan hampir semua gedung di area itu. Korban jiwa mencapai 168 orang dengan 680 orang luka-luka.

Selain itu, tentu saja pertimbangan ketatnya keamanan hakim dan pengadilan ini dilatarbelakangi oleh kejadian serangan 9/11 yang menysasar gedung *World Trade Center (WTC)* di New York, gedung Departemen Pertahanan (Pentagon) di Arlington, Virginia, dan gedung presiden (*White House*) atau gedung parlemen (Capitol Hill) di Washington D.C (tidak berhasil dan pesawat mendarat di Stonycreek, Pennsylvania). Serangan ini merenggut lebih dari 3.000 korban jiwa dan menghancurkan berbagai fasilitas publik.

Hal lain yang sangat relevan menjadi konteks adalah hak untuk memiliki dan menggunakan senjata (*right to keep and bear*

arms) di Amerika Serikat. Hak ini diperkenalkan dan dijamin oleh Amandemen Kedua Konstitusi (*the Second Amendment*) Amerika Serikat. Data terakhir menunjukkan lebih dari sepertiga orang dewasa di Amerika Serikat memiliki senjata api dengan 72% di antaranya menyatakan alasannya adalah untuk perlindungan diri. Namun, di sisi lain, data juga menunjukkan, hanya di 2021 terdapat 48.830 kematian akibat senjata api dengan 54% (26.328) di antaranya merupakan bunuh diri dan 43% (20.958) merupakan pembunuhan. Tingginya angka kematian akibat senjata api ini bahkan disebut dengan epidemik oleh berbagai kalangan.

Salah satu kejadian yang menimpa hakim terkait senjata ini adalah peristiwa penyerangan Hakim Esther Salas dan keluarganya pada Juli 2020. Salas yang merupakan hakim tingkat distrik di New Jersey diserang dengan senjata api di kediaman pribadinya. Anak laki-laki dan suami Hakim Salas meninggal akibat ditembak berkali-kali sementara ia selamat karena berada di basement rumahnya. Serangan ini dilakukan oleh Roy Den Hollander yang berprofesi sebagai pengacara yang kemudian dinyatakan tewas bunuh diri di kemudian hari.

Serangan ini tidak terkait dengan perkara yang sedang berlangsung sekalipun Salas berprofesi sebagai hakim dan Roy sebagai pengacara. Roy menyerang Salas lebih karena kebenciannya terhadap perempuan dan ide-ide feminisme dan sentimen ras karena Salas merupakan seorang *hispanic* (latin amerika). Di kemudian hari, pada 2021, Salas menyatakan bahwa Roy sebenarnya sedang merencanakan serangan terhadap Sonia Sotomayor, Hakim Agung Amerika Serikat, yang juga seorang perempuan dan berdarah Puerto Riko. Kejadian ini mendorong Komite Yudisial di Senat untuk menerbitkan UU Keamanan dan Privasi Kehakiman pada 2021. UU itu disebut sebagai *Daniel Aderl Act* untuk mengenang nama suami dari Hakim Salas.

Selain itu, sejarah pendirian *US Marshals Service* sendiri diwarnai oleh insiden senjata api. Setahun setelah lembaga ini berdiri, yaitu 1890, seorang Deputi *US Marshals Service*, David Butler Neagle menembak mati seorang Ketua Mahkamah Agung California, David S. Terry. Ia melakukan tindakan itu ketika mengawal seorang Hakim Agung Amerika Serikat, Stephen J. Field. Neagle lalu ditangkap oleh *Sheriff* dan dikenakan tuduhan pembunuhan. Kasus ini lalu dibawa ke Mahkamah Agung dan terkenal sebagai kasus *In re Neagle*, 135 U.S. 1 (1890) yang melahirkan prinsip imunitas bagi petugas federal untuk kebal dari penuntutan selama melaksanakan tugas dalam lingkup kewenangan pemerintah Federal.

Konteks-konteks di atas relevan dan sangat mempengaruhi cara pandang terhadap desain dan implementasi keamanan hakim dan pengadilan di Amerika Serikat. Begitu ketatnya desain keamanan hakim dan pengadilan di Amerika Serikat bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada pengalaman masa lalu serta konteks kekinian, seperti adanya hak untuk mempersenjatai diri (*right to keep and bear arms*).

2. KELEMBAGAAN KEAMANAN HAKIM DAN PENGADILAN DI AMERIKA SERIKAT

Aspek kelembagaan terkait keamanan hakim dan pengadilan di Amerika Serikat yang hari ini bisa dilihat, misalnya, *US Marshals Service*, merupakan hasil dari proses panjang sejarah. *US Marshals Service* dibentuk pada 1890, tepat satu tahun setelah UU Kekuasaan Kehakiman diterbitkan pada 1789. Dengan demikian, *US Marshals Service* sudah berdiri dan bekerja selama 133 tahun.

Lamanya *US Marshals Service* ini sudah berdiri bukan semata berbicara mengenai angka. Namun, terkait juga cara

pandang terhadap kelembagaan yang berperan dalam keamanan hakim dan pengadilan di Amerika Serikat. Lamanya *US Marshals Service* berdiri ini menandakan pula seberapa mapan desain dan implementasi hakim dan pengadilan di Amerika Serikat.

Dalam perjalanannya, tentu terdapat perkembangan yang berpengaruh kepada struktur, kewenangan, maupun orientasi *US Marshals Service*. Misalnya, pada awal 1920-an, *US Marshals Service* turut dilibatkan dalam penegakan pelarangan peredaran alkohol di Amerika Serikat (*Prohibitionist era*). Selain itu, *US Marshals Service* juga ikut terlibat dalam perang dingin melawan Uni Soviet.

Perkembangan lainnya adalah saat gerakan masyarakat sipil meningkat pada 1960an. *US Marshals Service* turut terlibat dalam dua kejadian monumental terkait desegregasi, yaitu pada kasus James Meredith (pemisahan kulit hitam dan kulit putih di Universitas Mississippi) dan kasus Ruby Bridges (siswi kulit hitam yang ditolak masuk sekolah di Louisiana). Kedua kasus ini tidak lepas dari peran dan perintah dari Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy dan Jaksa Agung Amerika Serikat, Robert F. Kennedy, kepada *US Marshals Service*.

Pada 1965, terjadi perubahan besar terhadap kelembagaan *US Marshals Service*. Pada tahun ini, terjadi konsolidasi kelembagaan dengan dibentuknya satu markas besar di pusat yang bertugas membawahi seluruh petugas *US Marshals Service* di wilayah Amerika Serikat. Markas besar ini berlokasi di Arlington, Virginia. Sebelumnya, setiap pengadilan memiliki petugas *Marshals* di bawah koordinasi sendiri.

US Marshals Service yang dikenal hari ini adalah lembaga penegak hukum federal yang didesain khusus untuk menyediakan keamanan bagi hakim dan warga peradilan (termasuk pengacara dan jaksa di area pengadilan). Secara kelembagaan, *US Marshal*

Service berada di bawah Departemen Kehakiman dan beroperasi atas perintah Jaksa Agung. Lembaga ini dipimpin seorang Direktur yang ditunjuk oleh Presiden dengan persetujuan (konfirmasi) oleh Senat.

Selain itu, *US Marshals Service* juga bertugas untuk menegakkan perintah dan putusan pengadilan. Untuk itu, dalam konteks penegakan perintah pengadilan, *US Marshals Service* bertugas, misalnya dalam pengawasan pembekuan dan penyitaan aset (*asset forfeiture*) atau perlindungan saksi dan korban. Dalam konteks pelaksanaan putusan pengadilan, *US Marshals Service* bertugas untuk mengawasi dan menjalankan eksekusi putusan pengadilan.

Selain *US Marshals Service*, beberapa lembaga juga bertanggung jawab untuk tugas-tugas keamanan hakim serta pelaksanaan putusan perintah atau putusan pengadilan. Misalnya yang paling erat adalah Kepolisian atau FBI. Secara sederhana, seluruh aspek keamanan di area pengadilan serta dengan ancaman tidak terlalu tinggi berada di bawah tanggung jawab *US Marshals Service*. Namun, apabila sudah berada di luar area pengadilan dan ada ancaman serius yang berujung pada dugaan tindak pidana, maka tanggung jawab tersebut juga menjadi domain Kepolisian atau FBI.

Selain itu, di Amerika Serikat sendiri sebenarnya memiliki model kepolisian yang ditempatkan secara khusus di tempat-tempat tertentu, misalnya *Campus Police*. Di beberapa kota, seperti New York, lembaga ini bahkan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaga ini disebut *police* karena disumpah untuk memiliki kewenangan pemolisian selayaknya polisi meskipun terbatas, misalnya kewenangan untuk dipersenjatai atau kewenangan untuk menangkap seseorang di area kampus.

Lembaga ini juga dilengkapi atribut dengan menggunakan nomenklatur kepolisian, baik di seragam maupun kendaraannya.

Lembaga ini berada langsung di bawah koordinasi dan perintah kampus dan tidak di bawah kepolisian. Namun, para personelya mendapat program pelatihan yang terstruktur dari aparat penegak hukum, seperti kepolisian. Para *personel campus police* ini berasal dari masyarakat biasa. Dengan sedikit perbedaan terutama pada kewenangannya, *campus police* ini mirip dengan polisi khusus kereta api atau satuan pengamanan.

Oleh karena itu, sebagai pembelajaran, secara umum paling tidak terdapat tiga pilihan kelembagaan yang perlu diuji lebih jauh untuk diterapkan di Indonesia:

- ~ Dilakukan oleh kepolisian seperti saat ini;
- ~ Dibentuk suatu lembaga khusus seperti *US Marshals Service*; atau

Revitalisasi fungsi satuan tenaga pengamanan yang ada saat ini dengan pemberian kewenangan pemolisian yang terbatas, seperti kewenangan untuk menangkap seseorang di area pengadilan untuk diserahkan dengan segera ke kepolisian. Hal ini juga termasuk desain khusus, minimal terkait status kepegawaian, program pelatihan, standardisasi kemampuan, serta atribut.

Perbedaan antara pilihan 2 dan 3 berada pada lembaga yang membawahi aspek kelembagaan ini. Pilihan 2 juga akan mencakup pilihan ketiga karena pembentukan lembaga khusus juga memerlukan sumber daya manusia satuan tenaga pengamanan. Perbedaannya adalah pilihan 3 bisa tidak bergantung pada pilihan 2 karena revitalisasi fungsi satuan tenaga pengamanan bisa tetap berada pada domain lembaga yang mempekerjakannya, dalam konteks ini misalnya pengadilan.

Lebih daripada itu, pilihan pembentukan lembaga khusus atau revitalisasi satuan tenaga pengamanan yang eksis saat ini punya poin lebih, yaitu menipiskan ketergantungan (dependensi) kepada kepolisian. Hal ini akan berpengaruh juga kepada independensi pengadilan ketika memeriksa perkara-perkara yang melibatkan kepolisian atau perkara pra-peradilan.

Sebagai catatan penting, terhadap pilihan-pilihan model kelembagaan ini perlu diadakan suatu studi kelembagaan yang lebih mendalam. Laporan kunjungan studi ini tidak berpretensi untuk mengajukan model kelembagaan seperti apa yang paling sesuai untuk keamanan hakim dan pengadilan di Indonesia.

3. KOORDINASI KEAMANAN HAKIM DAN PENGADILAN

Di Amerika Serikat kecenderungannya mungkin sedikit berkebalikan dengan beberapa negara. Pemangku kebijakan di Amerika Serikat memiliki kecenderungan untuk membagi semua urusan publik secara habis. Dengan kata lain, tidak ada urusan publik yang tidak ada yang mengurusnya. Hal ini, menurut beberapa ahli, dikarenakan cara pandang struktural-fungsional yang dikenal secara khas dimiliki oleh Amerika Serikat.

Oleh karena itu, kebanyakan persoalan yang timbul di Amerika Serikat adalah bukan siapa yang bertugas untuk apa. Namun, lebih kepada siapa-siapa saja yang bertugas untuk hal apa. Persoalan yang seringkali timbul dalam pelaksanaan urusan publik lebih kepada tumpang tindihnya (*overlapping*) dan bukan soal absennya kewenangan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila terdapat kecenderungan bagi lembaga publik di Amerika Serikat untuk terus-menerus memperbaharui bagan proses bisnis

mereka dari waktu ke waktu.

Hal ini juga terlihat dalam konteks keamanan hakim dan pengadilan. Mandat utama urusan publik ini diemban oleh *US Marshals Service*. Namun, terdapat juga beberapa kewenangan dari lembaga-lembaga lain terkait urusan ini. Mulai dari tingkat lokal, terdapat *sheriff* atau polisi lokal yang bertugas terkait dengan hal ini. Begitu juga, untuk setiap tingkatan, kepolisian juga memiliki kewenangan terkait dengan keamanan hakim dan pengadilan. Apabila terdapat irisan dengan kejahatan di bawah regulasi federal, maka FBI juga berwenang untuk urusan ini. Dari gambaran umum ini saja, terlihat bahwa urusan koordinasi kewenangan ini dapat menjadi tumpang tindih atau malah sengketa antar lembaga.

Tidak hanya berkaitan dengan urusan penegakan hukum, kewenangan *US Marshals Service* juga bersinggungan dengan Federal Protective Service (FPS), lembaga yang menangani fasilitas publik di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri (*Department of Homeland Security*), apabila menyangkut desain fasilitas pengadilan. Selain itu, untuk urusan fasilitas ini, *US Marshals Service* juga mesti berkoordinasi dengan pemerintah kota setempat (yang otonom), misalnya untuk pembatasan akses publik, seperti larangan parkir, pemasangan pagar pembatas, dan seterusnya.

Bahkan, *US Marshals Service* juga mesti berkoordinasi erat dengan satuan pengamanan presiden (*Secret Service*). Misalnya, dalam perkara-perkara yang akhir-akhir ini dihadapi oleh Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat. Di satu sisi, *US Marshals Service* memiliki tugas untuk menjaga keamanan hakim dan pengadilan. Sementara itu, di sisi lain, *Secret Service* juga bertugas untuk melindungi presiden, mantan presiden, serta keluarganya.

Oleh karena itu, tugas koordinasi dan bagan proses bisnis ini dianggap sangat penting oleh lembaga-lembaga di atas. Bahkan, satu unit dibentuk secara khusus dalam *US Marshals Service* untuk menjembatani koordinasi lembaga ini dengan Kantor Administrasi Pengadilan. Fungsi ini diemban oleh *Judicial Security Division (JSD)*. Selain menghubungkan dengan Kantor Administrasi Pengadilan, JSD juga bertugas untuk menghubungkan koordinasi dengan lembaga penegak hukum federal serta lembaga yang berhubungan dengan urusan publik lainnya.

Tidak mengherankan, urusan koordinasi ini dihitung pula sebagai ukuran pencapaian kinerja (*Key Performance Indicator (KPI)*). JSD, misalnya, menjadikan aspek koordinasi secara konstan di 94 distrik menjadi capaian kinerja tahunan mereka pada 2022. Sebagaimana cakupan wilayah kerja *US Marshals Service*, yaitu 1 markas besar untuk level pusat dan 94 distrik di seluruh wilayah Amerika Serikat.

Fungsi koordinasi ini tidak hanya diemban oleh *US Marshals Service*, tetapi juga oleh forum keamanan hakim dan pengadilan (*judicial or court security committee*). Komite ini merupakan padanan dari Forum Komunikasi Keamanan (FORKOM) yang diamanatkan oleh Peraturan MA No. 5 dan 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan. Dalam Peraturan MA tersebut, FORKOM diketuai oleh Wakil Ketua Pengadilan dengan komposisi Panitera, Sekretaris, dan unsur Satuan Pengamanan Pengadilan. FORKOM bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Court Security Committees (CSCs) di Amerika Serikat sebenarnya mulai mengemuka pasca peristiwa 9/11. Meski demikian, di beberapa wilayah sudah ada yang membentuknya sebelum kejadian itu. Pada 1982, misalnya, sudah ada rekomendasi

dari laporan satuan tugas di Kejaksaan Agung terkait keamanan pengadilan (*1982 Report of the Attorney General's Task Force on Court Security*). Laporan ini kemudian disetujui oleh *Judicial Conference* (sejenis rapat kamar MA yang diperluas).

Tugas dari CSCs ini pada pokoknya adalah mengadakan pertemuan rutin untuk mengkaji status dari keamanan saat ini, mendiskusikan perubahan yang diperlukan, dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam pelaksanaan keamanan hakim dan persidangan. Selain itu, pertemuan rutin CSCs juga ditujukan untuk menerima keanggotan atau aspek baru dalam keamanan hakim. Misalnya, pada 2012, rekomendasi CSCs diterima oleh *Judicial Conference* terkait perluasan keanggotan forum ini meliputi seluruh unit peradilan di suatu distrik, termasuk pengelola tempat penahanan.

Komposisi CSCs di setiap lokasi umumnya sama, yaitu meliputi seluruh unit terkait peradilan yang relevan dengan keamanan hakim. Ketua dari forum ini biasanya hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan. Misalnya, di Southern District of Florida, Judge Jose E. Martinez ditunjuk oleh Ketua Pengadilan menjadi Ketua CSCs di distrik tersebut. Forum ini umumnya ada di setiap wilayah, misalnya di Texas, California, Michigan, bahkan pada tingkat Mahkamah Agung negara bagian, seperti di Mahkamah Agung Ohio. Penamaan dari forum ini bervariasi, seperti *court security committee*, *judicial security committee*, *courthouse security committee*, *courtroom security committee*, *courthouse security standards committee*.

4. SARANA DAN PRASARANA KEAMANAN HAKIM DAN PENGADILAN

Dari sisi sarana dan prasarana, Amerika Serikat dan Indonesia memiliki banyak kemiripan. Dengan demikian, Indonesia sudah memiliki banyak modalitas untuk mengembangkan aspek keamanan hakim dan pengadilan secara lebih mapan. Salah satu fasilitas yang paling mencolok di Amerika Serikat adalah terkait sterilisasi area inti pengadilan. Misalnya, dengan pemasangan tiang pancang (*bollard*) maupun pembatasan akses melintas maupun parkir kendaraan.

Untuk pembatasan akses melintas dan parkir kendaraan, perlu dilihat juga konteks yang lebih jauh selain peristiwa bom yang terjadi di Amerika Serikat pada masa lalu, yaitu sistem transportasi yang sudah baik di Amerika Serikat menyebabkan moda transportasi utama ke dan dari gedung pengadilan adalah transportasi publik (bus, subway, atau paling mahal adalah taxi). Selain itu, tingginya biaya parkir membuat rendahnya keinginan untuk membawa kendaraan sendiri. Dengan demikian, pembatasan parkir kendaraan dapat terjadi. Hal ini tentu sangat berkebalikan dengan kondisi di Indonesia, di mana penggunaan kendaraan pribadi masih dominan.

Perbedaan paling mencolok dari sterilisasi ini adalah larangan yang tegas untuk membawa alat komunikasi (telepon genggam dan sebagainya), alat perekam, dan alat elektronik lainnya ke dalam area pengadilan. Pengecualian dilakukan terhadap mereka yang sudah mendapat izin (*clearance*), seperti jaksa, pengacara, dan staf pengadilan. Sebagai asumsi, bisa jadi larangan tegas untuk membawa peralatan komunikasi ini membuat hanya pihak yang berkepentingan saja yang ingin memasuki ruang pengadilan karena akan dipisahkan dari alat komunikasinya

selama waktu tertentu. Ditambah lagi, dilakukan *screening* secara ketat terhadap profil orang dan kepentingannya untuk bisa masuk ke area dalam pengadilan.

Untuk pengawasan melalui CCTV, pengadilan di Amerika Serikat dan Indonesia sudah sangat mirip. Hampir semua area dijangkau oleh CCTV, termasuk area luar gedung pengadilan. Perbedaannya adalah di Amerika Serikat terdapat ruang kontrol khusus (*control room*) yang dijaga oleh petugas US Marshals Service selama 24 jam. Dengan demikian, monitor pengawasan CCTV tidak diletakkan di ruang ketua pengadilan.

Selain itu, perbedaan lain yang mencolok adalah adanya jaminan perlindungan privasi dari perekaman CCTV ini. Secara protokol, seluruh rekaman CCTV akan dihapus secara berkala dalam satu bulan sekali (masa retensi). Penggunaan rekaman CCTV juga harus dilakukan sesuai dengan prosedur (*unlawful*) dan jika tidak akan menjadi tindakan perekaman ilegal.

Pada pintu masuk, konsep yang diterapkan hampir sama dengan Indonesia, yaitu konsep satu pintu masuk (*single entry point*). Terdapat mesin *x-ray* dan *metal detector* untuk memeriksa orang dan barang yang akan masuk ke dalam area dalam pengadilan. Fasilitas ini mungkin tidak ditemukan di semua pengadilan di Indonesia, tetapi jamak ditemui di pengadilan-pengadilan di kota besar, terutama di Jakarta. Di pengadilan yang dikunjungi di Amerika Serikat, fasilitas ini terlihat untuk harus dipastikan berfungsi setiap waktu sebagai sebuah standard keamanan. Selain itu, petugas dari ruang *control room* juga melakukan pengawasan terhadap orang yang akan masuk ke dalam pengadilan.

Masih di area pintu masuk pengadilan, terdapat pintu berlapis yang terbuat dari kaca anti peluru dan anti bom. Sekali lagi, fasilitas ini sangat terkait dengan konteks bom Oklahoma dan

serangan 9/11 pada masa lalu. Selain itu, terdapat juga konteks cuaca dan musim di Amerika Serikat. Pintu berlapis yang tebal ini juga berfungsi sebagai penahan cuaca dingin, terutama di musim dingin (salju).

Perbedaan yang cukup mencolok terlihat adalah petugas yang berjaga. Petugas *US Marshals Service* ini dilengkapi dengan atribut, seperti lencana dan jaket. Simbol atau atribut ini menandakan kewenangan. Petugas *US Marshals Service* memiliki kewenangan pemolisian terbatas, seperti melakukan penggeledahan terhadap orang/badan, penggeledahan terhadap barang, hingga mencegah seseorang untuk masuk ke area pengadilan (bahkan mengamankan seseorang untuk segera diserahkan ke penegak hukum lainnya).

Masuk ke area dalam pengadilan, terdapat papan elektronik yang berisi jadwal sidang. Namun, sama dengan Indonesia, jadwal sidang di papan pengumuman ini tidak berisi jadwal pasti waktu persidangan. Papan pengumuman berisi nama hakim, ruang sidang, dan terdakwa (para pihak). Waktu persidangan secara seragam hanya dituliskan dimulai pukul 9 pagi.

Untuk ruang sidang, satu ruang sidang hanya diperuntukkan untuk satu orang hakim. Oleh karena itu, cukup terkenal istilah ruang hakim A untuk menyebut satu ruang sidang tertentu karena hakim tersebut menggunakan ruang sidang itu untuk waktu yang panjang. Ukuran ruang sidang seragam, baik tata letak maupun ukurannya, meski terdapat beberapa perbedaan kecil untuk tata letak para pihak (jaksa, penasehat hukum).

Penggunaan ruang sidang secara individual hakim ini mendukung keamanan hakim. Di sebelah meja hakim, terdapat pintu yang hanya bisa diakses oleh hakim tersebut dan petugas *US Marshals Service* yang diberi akses. Pintu ini menuju kepada ruang kerja hakim. Ruang kerja ini ditempati secara pribadi oleh satu

orang hakim di mana ruang kerja satu hakim tidak berbaur dengan hakim yang lain.

Di bawah meja hakim, terdapat satu tombol khusus (*panic button*) yang dapat digunakan apabila terjadi keadaan darurat. Apabila tombol ini dipencet, maka petugas US Marshals Service dan aparat penegak hukum lain, akan segera hadir dan melaksanakan pengamanan atau protokol darurat, seperti evakuasi terhadap hakim dan warga pengadilan.

Untuk kendaraan, di Amerika Serikat hakim tidak diberikan fasilitas kendaraan dinas untuk digunakan secara pribadi. Oleh karena itu, hakim menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum dari dan ke tempat bekerja. Banyak hakim yang menggunakan kereta sebagai moda transportasi utama untuk bolak-balik (*commute*) bekerja. Penyediaan kendaraan khusus bagi hakim dilakukan apabila terdapat potensi ancaman atau apabila ada acara kedinasan yang bersifat khusus.

Selanjutnya, di Amerika Serikat, hakim tidak diberikan fasilitas rumah dinas. Semua hakim menempati kediaman pribadi, baik rumah (*landed houses*) maupun apartemen. Hal ini juga berkaitan dengan sistem karir hakim di Amerika Serikat yang tidak mengenal rotasi antar wilayah. Seorang hakim di Amerika Serikat pada umumnya hanya akan bertugas di satu wilayah tertentu.

Terkait dengan kediaman pribadi ini, banyak hakim yang tidak ingin menggunakan fasilitas keamanan, misalnya CCTV, dengan alasan privasi. Terutama apabila hakim tersebut tinggal di apartemen yang menggunakan fasilitas bersama dengan penghuni lain. Namun, saat ini hampir semua hakim sudah mau menerima fasilitas tombol darurat (*panic button*) yang dipasang di kediaman pribadi. Tombol darurat ini segera tersambung ke *US Marshals Service*, kepolisian, dan tentu saja nomor darurat (911) apabila terjadi kondisi darurat.

5. ANGGARAN KEAMANAN HAKIM DAN PENGADILAN

Dalam kunjungan studi dan penelusuran informasi tambahan, tidak ditemukan secara pasti anggaran total yang dialokasikan oleh negara. Hal ini mengingat aspek keamanan hakim dan pengadilan, sekalipun tanggung jawab utama *US Marshals Service*, tetapi juga beririsan dengan institusi lain, seperti Kepolisian, FBI, dan sebagainya.

Namun, informasi mengenai anggaran total *US Marshals Service* dapat diperoleh, yaitu lebih dari \$700 juta. Alokasi paling besar dipergunakan untuk petugas keamanan hakim dan pengadilan di bawah divisi *Court Security Officers (CSO)*, yaitu sekitar \$600 juta. Kemudian, \$110 juta untuk peralatan keamanan, seperti kamera, alarm, penghalang, mesin *x-ray*, *metal detectors*, pemeriksa surat dan paket, dan sebagainya. Pengelolaan dana untuk peralatan ini dilakukan oleh *Office of Security Systems*.

Anggaran ini digunakan untuk seluruh kegiatan *Judicial Security Division* di bawah *US Marshals Service*. Di mana terdapat lebih dari 230 personel penuh waktu, baik yang bekerja dalam lingkup operasional maupun administratif. Selain itu, terdapat lebih dari 5.700 petugas keamanan hakim dan pengadilan (CSO) dan lebih dari 60 kontraktor yang bekerja sama dengan divisi ini.

Pada 2022, anggaran ini diperuntukkan untuk menyediakan keamanan bagi seluruh pengadilan. Hal ini meliputi 33.330 petugas pengadilan, lebih dari 2.700 hakim yang menangani perkara, lebih dari 800 fasilitas pengadilan dengan luas lebih dari 67 juta persegi. Dari sisi pelaksanaan, selama 2022, anggaran di atas diserap untuk 10 tindakan perlindungan berbasis ancaman, 1.450 perlindungan dalam rangka perjalanan hakim, 111 pelatihan dengan peserta sebanyak 2.737 orang, dan investigasi terhadap

1.362 ancaman dan potensi ancaman.

Tidak ditemukan informasi secara pasti apakah anggaran tersebut cukup atau tidak. Apalagi perbandingan apakah anggaran tersebut relatif besar atau kecil dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya budget relative atau kemampuan fiskal berbanding dengan kebutuhan. Secara jumlah, mungkin postur anggaran di atas cukup besar, tetapi bisa jadi relatif dengan kebutuhan yang juga besar.

Namun, paling tidak, postur anggaran yang dialokasikan secara khusus ini dapat dijadikan baseline atau titik patok. Setiap tahun, anggaran keamanan hakim dan pengadilan di Amerika Serikat meningkat. Rumus yang digunakan untuk peningkatan ini adalah mengikuti laju inflasi di negara tersebut, yaitu sekitar 3-4% per tahun.

6. SUMBER DAYA MANUSIA KEAMANAN HAKIM DAN PENGADILAN

Sebagaimana yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya, sumber daya manusia terkait keamanan hakim dan pengadilan terdiri dari berbagai lembaga, termasuk kepolisian, pemerintah lokal, dan seterusnya. Namun, dalam lingkup *US Marshals Service* sebagai lembaga utama yang mengemban tanggung jawab urusan ini, model sumber daya manusia yang paling banyak adalah pegawai kontrak.

Dengan luas wilayah dan lingkup tanggung jawab yang ada, pegawai penuh waktu di *US Marshals Service* hanya berjumlah 230 orang. Petugas penuh waktu ini bertugas dalam hal manajemen, administrasi, dan operasional dan kebanyakan ditempatkan di

kantor pusat *US Marshals Service*. Oleh karena itu, sumber daya terdepan terkait keamanan hakim dan pengadilan di lapangan adalah pegawai kontrak yang bernama *Court Security Officers (CSO)*.

Para CSO ditempatkan di masing-masing unit pengadilan dengan supervisi dari satu *Deputy US Marshals Service*. Jumlah CSO di setiap pengadilan beragam tergantung kepada karakter pengadilan yang ada, tetapi minimal ada 3-4 orang CSO di setiap pengadilan. Terdapat juga pengadilan-pengadilan lokal yang tidak ada CSO dan keamanan hakim dilakukan oleh kepolisian atau Sheriff. Apabila dibagi secara wilayah, para Deputy dan CSO ini tersebar di 6 wilayah dengan 16 kantor penghubung. Setiap kantor penghubung diisi oleh *Assistant Chief Inspectors, Senior Inspectors, dan Intelligence Research Specialists*.

Para pegawai kontrak ini direkrut melalui kerjasama dengan lebih 60 kontraktor. Terdapat standard dan kepatuhan yang disusun, diterapkan, dan dievaluasi secara berkala terkait pengadaan dan relasi dengan para kontraktor ini. Seluruh hubungan dengan kontraktor ini dilakukan oleh *Judicial Security Division di kantor pusat US Marshals Service*.

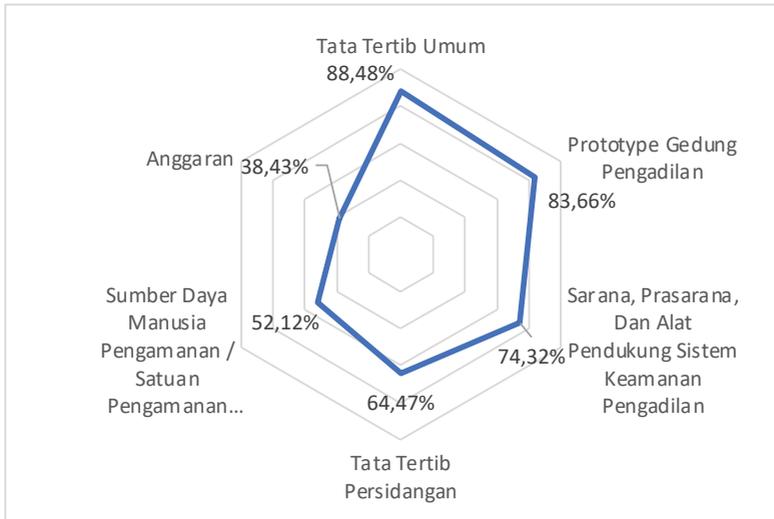
Kebanyakan dari para calon CSO ini merupakan pensiunan penegak hukum, seperti mantan polisi. Di Amerika Serikat, masa tugas kepolisian terbatas (kira-kira 15 tahun dan dapat diperpanjang). Namun, semua petugas CSO tetap mendapatkan pelatihan dan peningkatan kapasitas lanjutan. Saat ini terdapat lebih dari 5700 personel CSO di seluruh wilayah kerja di Amerika Serikat. Angka yang cukup kontras apabila dibandingkan dengan pegawai penuh waktu *US Marshals Service* yang berjumlah hanya 230 orang.

Apabila diperbandingkan dengan Indonesia, petugas CSO ini persis dengan Satuan Tenaga Pengamanan (SATPAM). Perbedaan yang paling menonjol adalah adanya standardisasi dalam perekrutan, pelatihan dan peningkatan kapasitas secara berkala, serta pemberian kewenangan pemolisian secara terbatas yang jelas, seperti penggeledahan orang/badan dan/atau barang, pengamanan terhadap orang-orang tertentu untuk segera diserahkan ke kepolisian, dan seterusnya. Kewenangan ini disimbolkan oleh penggunaan lambang atau lencana serta identitas yang jelas dari petugas CSO.

7. DESAIN PROTOKOL KEAMANAN HAKIM DAN PENGADILAN

Terkait dengan desain protokol keamanan hakim dan pengadilan, apabila dilihat dari sudut kerangka pengaturan, standard di Indonesia sudah mirip dengan Amerika Serikat. Dengan penerbitan Peraturan MA Nomor 5 dan 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan, *standard* normatif untuk desain protokol keamanan hakim dan pengadilan sudah sangat mapan (*advance*).

Persoalan yang paling utama adalah terkait dengan implementasi pada tataran praktik keamanan hakim dan pengadilan. Laporan Observasi Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 dan 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan di Lingkungan Pengadilan pada 51 pengadilan yang disusun oleh Komisi Yudisial pada 2022 menunjukkan penerapan *standard-standard* yang diamanatkan oleh peraturan ini sudah di atas rata-rata, yaitu di atas 70%. Meski demikian, terdapat beberapa catatan bahwa terdapat persentase yang berada di sekitar dan di bawah angka 50%, yaitu pada aspek anggaran (38.43%) dan sumber daya manusia (52.12%).



Aspek yang sudah cukup baik adalah tata tertib umum yang mencapai angka 88.48%. Aspek ini kemudian diikuti oleh prototipe gedung pengadilan, yaitu 83.66%. Kemudian, dua aspek yang sudah dapat dikatakan cukup, tetapi perlu ditingkatkan adalah terkait sarana, prasarana, dan alat pendukung sistem keamanan pengadilan (74.32%) dan tata tertib persidangan (64.47%).

Dua aspek yang paling lemah ini (anggaran dan sumber daya manusia) juga terkonfirmasi dari berbagai kegiatan sinergisitas yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dengan pengadilan, penegak hukum, pemerintah, media, dan masyarakat sipil. Forum sinergisitas ini merupakan program Komisi Yudisial yang diadakan secara rutin di berbagai daerah untuk menangkap persoalan dan mencari jalan keluar terkait keamanan hakim dan persidangan.

Terkait dengan anggaran, keluhan paling utama tentu minimnya anggaran yang berkaitan dengan keamanan hakim dan pengadilan yang dimuat secara terencana dalam postur anggaran

pengadilan. Hal ini menjadi semakin genting ketika terdapat kejadian-kejadian yang insidental dan membutuhkan pengamanan. Meskipun tugas menjaga keamanan diemban oleh Kepolisian menurut UU No. 2 Tahun 2022, tetapi dalam praktik kegiatan pengamanan ini memerlukan biaya untuk operasional personel kepolisian. Besarnya biaya ditentukan oleh seberapa besar dan lama pengamanan serta personel yang dikerahkan.

Kemudian, terkait dengan sumber daya manusia, hal yang seringkali menjadi tantangan adalah kurangnya sumber daya manusia, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dari sisi kualitas, sumber daya manusia yang ada tidak dilatih secara khusus dan spesifik serta tidak memiliki *standard* yang cukup sebagai satuan tenaga keamanan hakim dan pengadilan. Keterampilan dan *standard* yang dimiliki oleh sumber daya manusia ini lebih kepada satuan tenaga pengamanan.

Dari sisi kuantitas, karena kurangnya jumlah tenaga pengamanan, maka seringkali personel dari unit lain, seperti juru sita juga dilibatkan. Hal ini berpengaruh erat pada ketiadaan kemampuan dan *standard* untuk melakukan pengamanan dan berhubungan dengan pencari keadilan (*customer-based relation*). Jamak pada banyak kasus, pengadilan mau tidak mau harus bergantung kepada kepolisian. Dengan demikian, ini berdampak kepada anggaran serta ketergantungan (*dependensi*), bahkan pada derajat tertentu potensi konflik kepentingan terhadap kepolisian.

8. TRANSPARANSI, PARTISIPASI, DAN KEPERCAYAAN PUBLIK SERTA KUALITAS PROSES DAN HASIL HAKIM DAN PENGADILAN

Dalam kunjungan studi ini, terlihat bahwa transparansi, partisipasi, dan kepercayaan publik merupakan faktor yang berkontribusi erat (*contributing factor*) terhadap keamanan hakim dan pengadilan. Dengan adanya transparansi, partisipasi, dan kepercayaan publik, maka masyarakat (atau paling tidak para pihak) percaya lalu menerima proses dan hasil yang dikeluarkan oleh hakim dan pengadilan.

Beberapa hakim yang ditemui di Amerika Serikat menegaskan hal tersebut. Bahwa transparansi, partisipasi, dan kepercayaan publik menjadi faktor yang sangat berkontribusi bagi keamanan hakim dan pengadilan. Semua hakim yang ditemui di Amerika Serikat menyatakan bahwa keamanan tidak hanya sebatas keamanan, tetapi keamanan adalah landasan dalam memberikan putusan yang adil dan dapat diterima. Para hakim ini juga menyatakan bahwa keamanan tidak boleh menjadikan hakim terisolasi dari aspirasi masyarakat. Bahkan, para hakim ini sampai menyebutkan bahwa pemberian keamanan oleh *US Marshals Service* terkadang berlebihan dan mereka harus menolaknya.

Judge Demeo di Washington D.C, misalnya, menyatakan bahwa hakim yang punya sikap untuk mendengarkan adalah faktor penting bagi keamanan hakim dan pengadilan. Menurutnya, para pencari keadilan utamanya ingin didengarkan (*to be heard*) dan dijelaskan. Untuk itu, kemampuan atau kompetensi hakim dalam hal ini sangat penting.

Hal serupa ditegaskan pula oleh Hakim Brian Cogan, Hakim Pamela Chen, dan Hakim Kiyo Matsumoto di New York. Bahkan Hakim Brian Cogan, hakim yang menyidangkan perkara El Chapo, menyatakan bahwa kemampuan berkomunikasi (memberikan penjelasan dan mendengarkan aspirasi) serta citra imparialitas dan independen menjadi faktor yang paling krusial dibandingkan dengan berbagai fasilitas keamanan yang ada. Hakim Pamela Chen dan Hakim Kiyo Matsumoto juga menegaskan kualitas putusan adalah yang terpenting di mana jika putusan hakim berkualitas, maka pihak yang “dikalahkan” juga bisa menerima bahwa “kekalahannya” semata karena memang substansinya menyatakan demikian.

Terkait dengan transparansi, partisipasi, dan kepercayaan publik, aspek yang cukup penting untuk dibahas adalah terkait penyiaran sidang secara langsung. Di Amerika Serikat, memang di beberapa persidangan terdapat larangan dari hakim untuk merekam atau menyiarkan sidang secara langsung. Oleh karena itu, awak media biasanya menunggu di pintu pengadilan untuk melakukan wawancara *doorstop*. Hal ini cukup marak menjadi perdebatan pada kasus pembunuhan yang melibatkan pemain football terkenal, O.J. Simpson (1994).

Namun, tidak semua pengadilan melarang perekaman dan penyiaran sidang secara langsung. Di tingkat pengadilan lokal, biasanya perekaman dan penyiaran sidang secara langsung dapat dilakukan. Hal ini dapat dilihat pada persidangan tuduhan penistaan antara mantan pasangan suami-istri aktor dan aktris terkenal, Johnny Depp dan Amber Heard. Persidangan ini berlangsung pada 2022 di Pengadilan Fairfax County, Virginia. Saat itu, semua agenda persidangan disiarkan secara langsung, termasuk pada saat agenda pembuktian.

Dari kasus ini, kita dapat melihat bahwa larangan untuk merekam dan menyiarkan persidangan secara langsung di Amerika Serikat diterapkan dengan berbeda-beda. Semua keputusan untuk dapat merekam dan menyiarkan persidangan secara langsung diserahkan kepada pengadilan.

Namun, hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah bahwa semua risalah persidangan secara verbatim dapat diakses di website pengadilan. Dengan demikian, bagi banyak media yang diperlukan hanya *footage* gedung pengadilan dan kesempatan wawancara *doorstop*. Semua hal terkait dengan materi sudah dapat diakses melalui situs pengadilan pada hari persidangan yang sama. Perbedaan ini sangat mencolok antara Amerika Serikat dan Indonesia sehingga tidak bisa diambil secara sepenggal. Dengan kata lain, apabila terdapat larangan penyiaran secara langsung, semestinya semua *record* pengadilan juga bisa diakses.

Selain itu, akses terhadap jurnalis di Amerika Serikat juga sangat dijamin karena kebebasan pers merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, untuk jurnalis tulis diberikan akses yang optimal untuk menghadiri dan memberitakan persidangan. Bahkan di beberapa lokasi pengadilan, termasuk di Mahkamah Agung Amerika Serikat, jurnalis diberikan kursi secara khusus.

Selanjutnya, dari informasi para hakim di Amerika Serikat, tidak pernah ada peristiwa hakim melaporkan masyarakat dengan dugaan penghinaan atau pencemaran nama baik. Satu hal yang sangat mendasar adalah bahwa jaminan kebebasan untuk menyatakan pendapat sangat dihargai di Amerika Serikat. Namun, selain daripada itu, menurut informasi dari para hakim tersebut pelaporan atau gugatan terhadap masyarakat oleh hakim sangat tidak elok dan hanya akan menurunkan citra dan kewibawaan hakim atau pengadilan sendiri. Menurut mereka, ketika kepercayaan

publik tinggi terhadap hakim dan pengadilan, maka kepercayaan itu sendiri yang akan memberikan penjelasan terhadap tindakan-tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik yang ada.

Hal yang penting untuk digarisbawahi adalah tindakan-tindakan yang menyangkut ketersinggungan dan subjektif hakim, seperti kritik atau bahkan penghinaan terhadap hakim, baik melalui media massa atau media sosial, juga tidak menjadi ruang lingkup tugas *US Marshals Service*. Dari kunjungan ini, informasi yang cukup jelas diberikan oleh *US Marshals Service* bahwa tindakan yang mengarah pada ketersinggungan hakim itu merupakan urusan pribadi hakim. *US Marshals Service* bertugas dan berfokus untuk melindungi keselamatan hakim dari ancaman dan potensi ancaman.

Bahkan, dari beberapa diskusi dengan *US Marshals Service* dan para hakim di Amerika Serikat, mereka cukup tercengang dan heran jika ada hakim yang mengadukan masyarakat kepada pihak kepolisian dengan tuduhan penghinaan atau pencemaran nama baik. Hal ini, selain tidak lazim, justru dapat menciderai kehormatan hakim dan pengadilan sendiri serta berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap hakim dan pengadilan.

BAB V

Simpulan

Bab V

Simpulan

Kunjungan studi terkait keamanan hakim dan pengadilan di Amerika Serikat memberikan banyak perspektif dan nilai tambah terhadap dorongan perubahan kebijakan di Indonesia. Berbagai studi dan bahkan peraturan sebenarnya sudah banyak diciptakan dan tersedia untuk mendorong hal ini.

Secara general, melalui kunjungan studi ini, diperoleh pandangan bahwa desain keamanan hakim dan pengadilan di Amerika Serikat dan Indonesia sudah mencapai standard yang sama dengan beberapa konteks yang berbeda. Perlu sangat berhati-hati untuk menangkap desain dan praktik keamanan hakim dan pengadilan di Amerika Serikat sesuai dengan konteks, dalam arti melihatnya secara utuh dan saling berkaitan dengan aspek-aspek yang lain.

Utamanya, persoalan di Indonesia lebih banyak kepada implementasi atau praktik keamanan hakim dan pengadilan. Selain itu, persoalan utama yang dihadapi di Indonesia adalah terkait anggaran dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, sasaran perbaikan kebijakan ke depan mesti difokuskan kepada dua hal ini.

Sebagaimana disebutkan pada awal dokumen ini, laporan kunjungan studi ini tidak berpretensi untuk menjawab semua persoalan terkait dengan keamanan hakim dan pengadilan. Laporan ini adalah laporan kunjungan studi dan observasi terkait

keamanan hakim dan pengadilan di dua kota di Amerika Serikat.

Namun, laporan kunjungan studi ini dapat memberikan nilai tambah dan harus dibaca berbarengan dengan berbagai produk Komisi Yudisial terkait. Misalnya, Laporan Observasi Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 dan 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan di Lingkungan Pengadilan pada 51 pada 2022 dan tahun 2023 maupun berbagai langkah penanganan dan pencegahan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hal ini untuk mendapat gambaran yang lebih komprehensif terkait aspek-aspek mana yang perlu ditingkatkan dalam keamanan hakim dan pengadilan.

Terkait dengan kelembagaan, laporan ini tidak akan melompat kepada kesimpulan untuk pembentukan lembaga baru dan khusus terkait keamanan hakim dan pengadilan. Hal ini memerlukan studi kelembagaan, dampak anggaran, serta pengukuran efektivitas yang lebih mendalam. Namun, studi ini memberikan kategori pilihan kebijakan yang perlu dipertimbangkan.

Selain itu, aspek penting yang fundamental yang diperoleh dari kunjungan studi ini adalah bahwa keamanan hakim dan pengadilan tidak hanya bisa diciptakan dari berbagai perangkat keamanan (lembaga, anggaran, sumber daya manusia, desain dan protokol, dan seterusnya). Namun, kualitas proses dan putusan pengadilan yang dihasilkan oleh hakim yang berkualitas, independen, dan imparisial juga tidak kalah pentingnya, bahkan dapat dikatakan yang paling penting.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Surat undangan dari *Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training* (OPDAT) US Department of Justice



U.S. Department of Justice
Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance, and Training
(OPDAT)

L065/BFM/USDOJ-OPDAT/IV/2023

Jakarta, April 17, 2023

Hon. Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D
Commissioner
Human Resources, Advocacy, Legal, Research and Development
Judicial Commission of the Republic of Indonesia

Re: Confirmation of Court Security Comparative Study to Washington DC and New York

On behalf of the Department of Justice Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPDAT) we would like to confirm the participation of the following names for the Court Security Study Tour in Washington DC and New York on June 12-16, 2023.

1. Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M. Hum. (Chairperson of Judicial Commission of the Republic of Indonesia)
2. Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D (Member of Judicial Commission for Human Resources, Advocacy, Legal, Research and Development of the Republic of Indonesia)
3. Arie Sudihar, S.H., M.Hum. (Secretary-General of Judicial Commission of the Republic of Indonesia)
4. Ir. Supriatna, MMSi. (Head of General Affairs Bureau)
5. Miko Ginting (Judicial Commission of the Republic of Indonesia)
6. Tabah Sulisty, S.H., M.H. (Senior Judicial Officer)
7. Kurniawan Desiar, S.H., M.H. (Senior Judicial Officer)

As mentioned in our previous letter, for U.S. Government Visa Program (GVP) requirements, please visit <https://id.usembassy.gov/visas/nonimmigrant-visas/>. The delegation must prepare a valid official passport, diplomatic note from Ministry of Foreign Affairs, 5x5cm photo with a white background, and a completed DS-160 form.

Please contact Ms. Ade Budiningsih at **0811-9204-939** or via email at budiningsih@state.gov with any questions regarding logistics or questions generally.

Thank you for your kind attention.

Sincerely,



Bruce Miyake
Resident Legal Advisor
USDOJ OPDAT
U.S. Embassy Jakarta

Approved by: [Signature] (2023) 04-17-2023
Approved by: [Signature] (2023) 04-17-2023
Approved by: [Signature] (2023) 04-17-2023
Approved by: [Signature] (2023) 04-17-2023

2. Surat balasan Komisi Yudisial RI kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta sekaligus penunjukan delegasi



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1129/PIM/AH.01.02/04/2023 Jakarta, 17 April 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : *Delegation of Court Security Comparative Study to Washington DC and New York*

Yth. Mr. Bruce Miyake
Resident Legal Advisor
USDOJ OPDAT
U.S. Embassy Jakarta

I am writing in response to your letter Number L052/BFM/USDOJ-OPDAT/IV/2023 inviting the Judicial Commission to conduct a court security comparative study in Washington DC and New York. The Judicial Commission is honored to have been invited to conduct this study and accepts the invitation. We have assigned the following individual to conduct the visit:

1. Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum (Chairperson of Judicial Commission of the Republic of Indonesia);
2. Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D (Member of Judicial Commission for Human Resources, Advocacy, Legal, Research and Development of the Republic of Indonesia);
3. Arie Sudihar, S.H., M.Hum. (Secretary-General of Judicial Commission of the Republic of Indonesia);
4. Ir. Supriatna, MMSi., (Head of General Affairs Bureau);
5. Miko Ginting (Judicial Commission of the Republic of Indonesia Spokesperson);
6. Tabah Sulisty, S.H., M.H. (Senior Judicial Officer); and
7. Kurniawan Desiarto, S.H., M.H. (Senior Judicial Officer).

To complete the administrative requirement for applying an exit permit to the State Secretariate and an official passport to the Ministry of Foreign Affairs, the Judicial Commission kindly requests that USDOJ OPDAT provide a confirmation

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450
Telp.: 021-3905876-77, 3906178, Fax: 021-3906215
website: www.komisiyudisial.go.id, email: kyri@komisiyudisial.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri oleh Kementerian Sekretariat Negara



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327

Faksimile (021) 3813583, Situs : www.setneg.go.id

Nomor : B-00001480/Kemensetneg/Ses/Simpel/05/2023 06 Mei 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri

Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
di Jakarta

Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor 128/SET/AH.01.02/04/2023 tanggal 27 April 2023 hal tersebut di atas, dengan hormat diberitahukan bahwa Pemerintah menyetujui perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat/pegawai sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir.

Persetujuan Pemerintah ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perjalanan dinas luar negeri dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan yang sangat tinggi.
2. Yang bersangkutan menghubungi Kedutaan Besar RI/ Perwakilan di negara setempat untuk menyampaikan maksud kedatangan.
3. Laporan tertulis hasil perjalanan dinas tersebut agar disampaikan kepada Kementerian Sekretariat Negara.
4. Perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan dengan mematuhi kebijakan nasional dan kebijakan negara tujuan terkait penanganan pandemi COVID-19.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Menteri Sekretaris Negara
Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara,



Setya Utama

Tembusan:

1. Kepala BPKP
2. Dirjen Anggaran, Kemenkeu
3. Dirjen Perbendaharaan, Kemenkeu
4. Dir. Konsuler, Kemenlu
5. Dubes / Kepala Perwakilan RI Setempat
6. Yang Bersangkutan

*) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

4. Susunan awal rencana agenda kunjungan dan pertemuan selama di Amerika Serikat

Washington D.C.	
Senin, 12 Juni 2023	
10.00	United States Marshall Service (USMS)
10.30-11.00	Office of Protective Operations (OPO) Unit ini bertugas untuk menangani perlindungan fisik terhadap hakim maupun perlindungan fisik di berbagai kegiatan peradilan.
11.00-11.30	Office of Protective Intelligence (OPI) Unit ini bertugas untuk mengumpulkan berbagai informasi yang bersifat intelijen dalam rangka perlindungan.
11.30-12.00	Office of Threat Management Unit ini bertugas untuk mengkoordinasikan respons terkait ancaman terhadap peradilan maupun lembaga-lembaga yang terkait dengan pengadilan.
13.30-14.00	Office of Security System (OSS) Unit ini bertugas untuk mengkoordinasikan berbagai peralatan keamanan, seperti kamera, kartu akses, pagar pengaman, dan sebagainya.
14.30-15.00	Office of Court Security (OCS) Unit bertugas untuk menyusun program maupun pelatihan bagi petugas keamanan.

15.00-15.30	<p>Judicial Security Overview (JSO)</p> <p>Unit ini bertugas untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam rangka perlindungan peradilan.</p>
15.30-16.00	<p>Office of Financial Management (OFM)</p> <p>Unit ini bertugas mengelola keuangan bagi kegiatan US Marshall, termasuk pengelolaan kontrak bagi para petugas keamanan.</p>
16.00-16.30	<p>National Center for Judicial Security</p> <p>Unit ini bertugas untuk menyiapkan pelatihan, penelitian, sampai dengan penilaian terhadap seluruh fasilitas peradilan, termasuk kediaman pejabat peradilan.</p>
Selasa, 13 Juni 2023	
08.45-09.30	<p>Administrative Office of the United States Courts</p> <p>Agenda di sini lebih kepada melihat dan mengamati praktik langsung pengamanan pengadilan.</p>
09.30-11.30	<p>Diskusi dengan Administrative Office of the United States Courts</p> <p>Di sini akan diadakan pertemuan untuk mendiskusikan pengamatan terhadap praktik langsung pengamanan pengadilan.</p>
13.00-15.30	<p>Washington DC Superior Court</p> <p>Agenda di sini untuk melihat dan mengamati praktik langsung pengamanan pengadilan.</p>

New York	
Kamis, 15 Juni 2023	
09.30-12.00	<p>Diskusi dengan <i>US Marshall Service, US Attorney's Office (USAO)</i>, Petugas Pengadilan di Eastern District Court of New York</p> <p>Di sini diadakan diskusi terkait praktik-praktik pengamanan peradilan.</p>
13.00-15.30	<p>Diskusi dengan District Court Judges di Eastern District Court of New York</p> <p>Di sini diadakan diskusi terkait praktik-praktik pengamanan peradilan.</p>
Jumat, 16 Juni 2023	
09.30-10.30	<p>Diskusi dengan 1 New York Courthouse</p> <p>Di sini diadakan diskusi terkait praktik-praktik pengamanan peradilan.</p>

Catatan:

Seluruh foto dan rekaman audio (bahasa Indonesia dan Inggris) dari kegiatan per kegiatan kunjungan ini tersedia dan bisa diberikan apabila terdapat permintaan.



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kramat Raya No 57 Jakarta Pusat
Telp. (021)3905876 Fax. (021)3906215. PO BOX 2685
website: www.komisiyudisial.go.id